

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM
DESA) DALAM RANGKA MENINGKATKAN
EKONOMI MASYARAKAT**

**(STUDI PADA DESA KERKEP KECAMATAN GURAH
KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

FAISAL WISNUNGALA

NIM. 175030118113026



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021

MOTTO

"Memulai dengan penuh keyakinan,
Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan".

(Aristoteles)



PERSEMBAHAN

**“KUPERSEMBAHKAN KARYAKU
KEPADA BAPAK DAN IBUKU
TERCINTA”.**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Disusun Oleh : Faisal Wisnunggala
NIM : 175030118113026
Fakultas : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : -

Komisi Pembimbing
Malang, 30 Juli 2021

Ketua

Anggota



Dr. Imam Hanafi, S.Sos, M.Si, MS
NIP. 196910021998021001



Andhyka Muttaqin, S.AP., MPA
NIP. 2011068504211001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan Majelis Penguji Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Agustus 2021

Jam : 09.00 - Selesai

Skripsi Atas Nama : Faisal Wisnunggala

Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri)

Dinyatakan

LULUS

Majelis Penguji

Ketua



Dr. Imam Hanafi, S.Sos, M.Si, MS

NIP. 196910021998021001

Anggota



Dr. Drs. Bambang Santoso Haryono, MS

NIP. 196102041986011001

Anggota



Andhyka Muttaqin, S.AP.,MPA

NIP. 2011068504211001

Anggota



Dr. Drs. Siswidiyanto, MS

NIP. 196007171986011002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 02 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



Faisal Wisnunggala

NIM. 175030118113026

ABSTRAK

Faisal Wisnunggala, 2021, **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat” (Studi Pada BUMDes Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri)**, Dr. Imam Hanafi, S.Sos, M.Si,MS 138 hal + cxxxviii

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dianjurkan memiliki suatu lembaga perekonomian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga masyarakat sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan khususnya kebutuhan pokok. Adanya lembaga ini diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Desa dan kemudian dikembangkan sebagai salah satu produk yang berpengaruh terhadap Peningkatan Perekonomi Masyarakat. Seperti Pemerintah Desa Kerkep yang mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sejak Tahun 2017. Harapannya, BUM Desa ini dapat berperan secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa terkait dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, serta untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa terkait dengan Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu, (1) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, (2) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif Miles dan Huberman dengan tahapan kondensi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah Peran BUM Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat adalah sebagai fasilitator. Dimana BUM Desa Desa Kerkep mengembangkan potensi Desa Wisata/Pariwisata sebagai wadah penyaluran berbagai kreatifitas masyarakat yang akan dijual ditempat Wisata. Faktor Pendukung dalam Peran BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat ialah adanya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kerkep, serta kerjasama Antar Lembaga. Faktor Penghambat dalam Peran BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat adanya sebagian masyarakat yang kurang mengerti terkait dengan tujuan berdirinya lembaga BUM Desa.

Kata Kunci : Peran BUM Desa, Ekonomi Masyarakat

ABSTRACT

Faisal Wisnunggala, 2021, "**The Role of Village Owned Enterprises (BUM Desa) in the context of Improving the Community Economy**" (Study on BUMDes in Kerkep Village, Gurah District, Kediri Regency), Dr. Imam Hanafi, S. Sos, M. Si, MS 138 hal + cxxxviii

Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is explained that the Village Government is recommended to have an economic institution, namely Village Owned Enterprises (BUM Desa). Village-Owned Enterprises are community institutions as a forum to meet needs, especially basic needs. The existence of this institution is expected to be able to explore the potential possessed by the Village and then be developed as one of the products that affect the Community Economic Improvement. Like the Kerkep Village Government which established a Village-Owned Enterprise (BUM Desa) since 2017. It is hoped that this BUM Desa can play a significant role in improving the welfare of the local community. The purpose of this study is to find out, describe, and analyze related to the role of Village Owned Enterprises (BUM Desa) in order to improve the community's economy, as well as to find out, describe, and analyze related to the Supporting Factors and Factors Inhibiting the Role of Village Owned Enterprises (BUM Desa).) in order to improve the community's economy. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach and is limited by two research focuses, namely, (1) the role of village-owned enterprises (BUM Desa) in order to improve the community's economy, (2) supporting factors and inhibiting factors for the role of village-owned enterprises (BUM). Village) in the context of Improving the Community Economy. The data analysis used is the Miles and Huberman interactive model data analysis with the stages of data condensation, data presentation, and drawing conclusions or verification. The conclusion that can be obtained in this study is that the role of BUM Desa in Improving the Community Economy is as a facilitator. Where BUM Desa Kerkep Village develops the potential of Tourism/Tourism Villages as a forum for channeling various community creativity which will be sold at tourist sites. Supporting factors in the role of BUM Desa in the context of Improving the Community Economy are the support provided by the Kerkep Village Government, as well as inter-institutional cooperation. Inhibiting Factors in the Role of BUM Desa in the context of Improving the Community Economy there are some people who do not understand related to the purpose of establishing the BUM Desa institution.

Keywords : The Role of BUM Desa, Community Economy

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| MOTTO | ii |
| PERSEMBAHAN | iii |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| TANDA PENGESAHAN | v |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Kontribusi Penelitian..... | 8 |
| 1.5 Sistematika Pembahasan..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Tinjauan Empiris..... | 13 |
| 2.2 Tinjauan Teoritis..... | 16 |
| 2.3 Administarsi Publik..... | 16 |
| 2.3.1 Fungsi-Fungsi Administrasi Publik..... | 17 |
| 2.3.2 Ruang Lingkup Administrasi Publik..... | 19 |
| 2.4 Manajemen Publik..... | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 2.5 Pemerintah Desa..... | 23 |
| 2.6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)..... | 27 |
| 2.6.1 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)..... | 27 |
| 2.6.2 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) | 28 |
| 2.6.3 Peran BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat | 30 |
| 2.6.4 Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa | 30 |
| 2.7 Konsep Manajemen Strategik | 33 |
| 2.7.1 Manajemen..... | 33 |
| 2.7.2 Strategi | 36 |
| 2.7.3 Manajemen Strategik..... | 39 |
| 2.8 Teori Peranan (Role Theory)..... | 44 |
| 2.8.1 Pengertian Teori Peranan..... | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 50 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 50 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 52 |
| 3.3 Lokasi dan Situs Penelitian | 54 |
| 3.4 Sumber Data | 55 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 57 |
| 3.6 Instrumen Penelitian..... | 59 |
| 3.7 Analisis Data | 60 |
| 3.8 Keabsahan Data..... | 63 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 67 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian..... | 67 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kediri..... | 67 |
| 4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kediri..... | 71 |
| 4.2 Gambaran Umum Desa Kerkep | 72 |
| 4.3 Gambaran Umum BUM Desa Desa Kerkep, Kecamatan Guruh, Kabupaten Kediri..... | 77 |
| 4.3.1 Struktur Organisasi BUM Desa..... | 78 |

| | |
|--|------------|
| 4.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi BUM Desa | 79 |
| 4.3.3 Visi dan Misi BUM Desa, Desa Kerkep | 83 |
| 4.4 Penyajian Data..... | 84 |
| 4.4.1 Peran BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat | 84 |
| 4.4.2 Peran BUM Desa sebagai Fasilitator | 86 |
| 4.4.3 Upaya BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat..... | 93 |
| 4.4.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat | 94 |
| 4.5 Pembahasan dan Analisis Data..... | 99 |
| 4.5.1 Peran BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat | 99 |
| 4.5.2 Upaya BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat | 108 |
| 4.5.3 Faktor Pendukung dan Penghambat BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat..... | 109 |
| BAB V PENUTUP | 115 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 115 |
| 5.2 Saran | 117 |
| DAFTAR PUSTAKA | 119 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 123 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 13 |
| Tabel 4.1 Prioritas Program BUM Desa Tahun 2020 | 85 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif 62

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kediri 67

Gambar 4.2 Peta Desa Kerkep, Kecamatan Guruh, Kabupaten Kediri..... 72

Gambar 4.3 Logo BUMDes Desa Kerkep, Kecamatan Guruh, Kabupaten Kediri
..... 78

Gambar 4.4 Struktur Organisasi BUMDes Desa Kerkep, Kecamatan Guruh,
Kabupaten Kediri 79

Gambar 4.5 Wawancara Bersama Komisaris BUMDes Desa Kerkep, Kecamatan
Guruh, Kabupaten Kediri 88

Gambar 4.6 Fasilitas Desa Wisata/Pariwisata BUM Desa..... 88

Gambar 4.7 Mapping Proses Pembangunan Desa Wisata/Pariwisata 88

Gambar 4.8 Wawancara bersama Bendahara BUM Desa 90

Gambar 4.9 Outlet Tempat Jualan Masyarakat Desa Kerkep di Lokasi Tempat
Wisata 92

Gambar 4.10 Sumber Desa Wisata/Pariwisata Desa Kerkep..... 92

Gambar 4.11 Kolam Renang Anak Desa Wisata/Pariwisata Desa Kerkep..... 92

Gambar 4.12 Tiket Masuk Kawasan Desa Wisata/Pariwisata 92

Gambar 4.13 Wawancara Bersama Ketua Lembaga BUM Desa 96

Gambar 4.14 Wawancara Bersama Sekertaris BUM Desa 97

Gambar 4.15 Foto Bersama Kepala Desa Kerkep 131

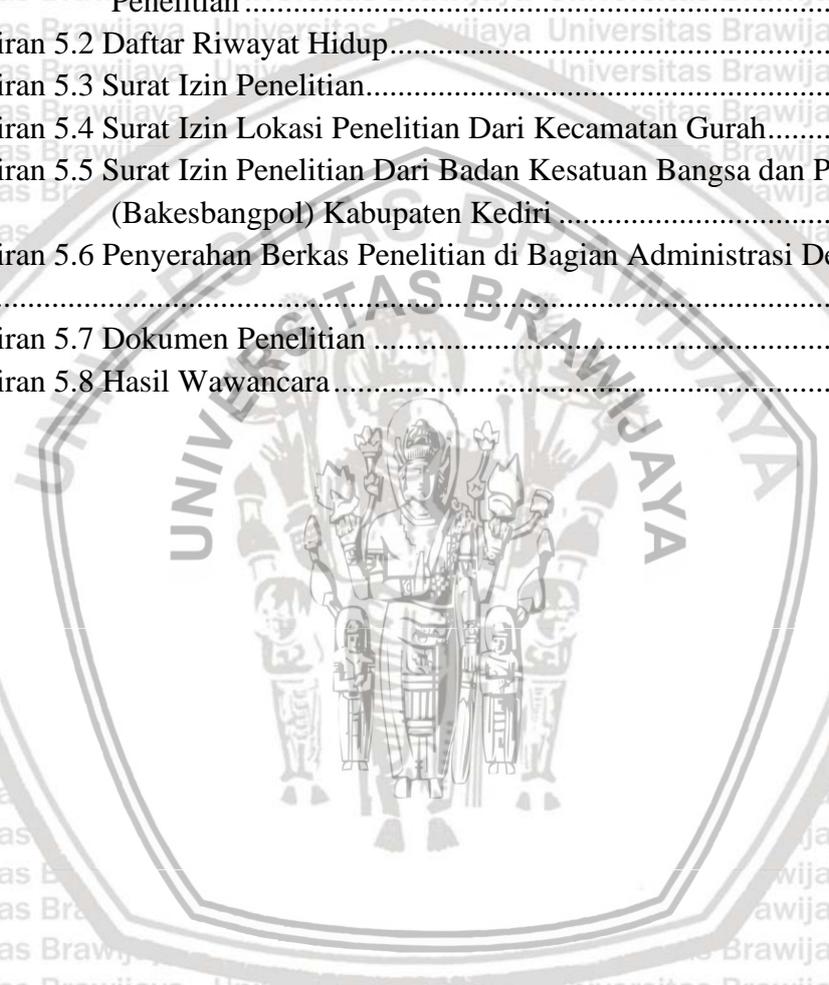
Gambar 4.16 Kantor Desa Kerkep 132

Gambar 4.17 Kantor BUM Desa, Desa Kerkep 131

Gambar 4.18 Kunjungan di Desa Wisata/Pariwisata Desa Kerkep 131

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 5.1 Instrumen Penelitian Pedoman Wawancara/Interview Guide Penelitian | 123 |
| Lampiran 5.2 Daftar Riwayat Hidup..... | 126 |
| Lampiran 5.3 Surat Izin Penelitian..... | 127 |
| Lampiran 5.4 Surat Izin Lokasi Penelitian Dari Kecamatan Gurah..... | 128 |
| Lampiran 5.5 Surat Izin Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kediri | 129 |
| Lampiran 5.6 Penyerahan Berkas Penelitian di Bagian Administrasi Desa Kerkep | 130 |
| Lampiran 5.7 Dokumen Penelitian | 130 |
| Lampiran 5.8 Hasil Wawancara..... | 133 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara luas yang tidak hanya berpusat di Ibu Kota semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita Negara juga berlangsung pada tingkat Desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup didaerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah dikawasan Desa. Keberadaan Desa juga menentukan keberhasilan Pemerintah dalam hal pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu Desa sangat menentukan kemajuan suatu Negara (Lorosa, 2017:26).

Sebagai sebuah Bangsa yang senantiasa berupaya untuk maju, Negara Kesatuan Republik Indonesia turut melaksanakan pembangunan yang dikenal dengan Pembangunan Nasional. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa dalam rangka mencapai Tujuan Negara. Yang dimaksud penjelasan diatas adalah semua komponen atau unsur Bangsa Indonesia tanpa terkecuali turut serta dalam Pembangunan Nasional.

Desa sebagai salah satu komponen dari Bangsa Indonesia turut serta dalam Pembangunan Nasional. Pelaksanaan pembangunan pedesaan, sesungguhnya

sudah dilakukan sejak lama melalui lembaga kemasyarakatan seperti, Koperasi Desa, Kelompok Tani, PNPM Mandiri dan Lembaga kemasyarakatan lainnya, sebagai akibat dari masuknya program pembangunan ke pedesaan. Lembaga-lembaga yang muncul merupakan inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Sebagian besar lembaga-lembaga tersebut masih bersifat tradisional dan memiliki berbagai kekurangan dari segi organisasi/kelembagaan modern. Salah satu faktornya adalah intervensi yang diberikan oleh Pemerintah terlalu besar, akibatnya dapat menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat Desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi dipedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi dipedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian masyarakat.

Jumlah Desa di Indonesia, senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 mencatat jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010. Meskipun dengan jumlah tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun hal tersebut tidak sebanding dengan kondisi pembangunan Desa yang seiring membaik. Menurut Indeks Desa Membangun Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menyatakan bahwa, pada tahun 2021 terdapat 12.068 Desa yang masuk sebagai kategori Desa tertinggal. Hasil tersebut didapat berdasarkan pengembangan tiga dimensi dasar, yakni dimensi Sosial, Ekonomi, dan Ekologi.

Dengan demikian, Desa merupakan suatu wilayah yang sangat memerlukan pembangunan dan pengembangan khususnya basis ekonomi. Pembangunan ini merupakan suatu usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan antara Desa dan Kota. Disamping itu, pembangunan pedesaan dipandang juga sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana atau meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan maupun perumahan (Rani, 2018:15-16).

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia khususnya masyarakat dipedesaan tentu direalisasikan melalui beberapa kebijakan ataupun program yang dalam pelaksanaannya sudah terlihat sejak adanya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk strategi pembangunan Desa. Strategi pembangunan Desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan Desa dirasa masih kurang optimal sehingga masih banyak Desa dengan kategori tertinggal. Namun disisi lain Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan masalah ketertinggalan Desa dengan cara meningkatkan anggaran untuk pembangunan Desa dari tahun ke tahun supaya mampu mengurangi jumlah Desa yang tertinggal.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia membutuhkan adanya suatu lembaga sebagai sarana yang dapat mempercepat pembangunan pedesaan serta dapat melaksanakan pemberdayaan

perekonomian ditingkat Desa. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan wujud perbaikan yang diharapkan dapat menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan Ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa.

Surjawerni (2019:1) menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumberdaya ekonomi Desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan guna mengelola asset-aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUM Desa semakin diperjelas oleh Pemerintah dengan keluarnya Pemdes No.4 Tahun 2015 dijelaskan secara terperinci mengenai proses pendirian BUM Desa, siapa saja yang berhak mengelola BUM Desa, permodalan BUM Desa, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan diatur dalam Permen ini.

Seperti Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based on Village*). Sehubungan dengan itu skala prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan mencakup: (1) Pengembangan Kelembagaan; (2) Pemberdayaan Masyarakat; (3) Pengembangan Ekonomi Lokal dan (4)

Pembangunan Sarana dan Prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi Desa, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa.

Keberadaan BUM Desa diperkuat dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014

Tentang Desa, dan mengharuskan Desa untuk memasuki era *Self Governing Community*, dimana Desa secara otonom memiliki wewenang untuk mengelola Perencanaan Pembangunan, Pelayanan Publik, dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya UU Desa mengatur tentang pendirian BUM Desa sebagai bahan yang penting dari roda kehidupan Desa. Adanya Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendesa) No. 4 Tahun 2015 semakin menguatkan inisiasi pendirian BUM Desa sebagai salah satu prioritas pembangunan Desa.

Di Jawa Timur upaya menjadikan Desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUM Desa sudah berlangsung sejak disahkannya peraturan tentang BUM Desa itu sendiri. Hampir setiap Kabupaten diwilayah Jawa Timur mempunyai *Pilot Project* BUM Desa. Pendirian BUM Desa sendiri disesuaikan dengan karakteristik lokalitas dan kapasitas ekonomi Desa yang ada, upaya mewujudkan konsep pendirian BUM Desa, dirintis untuk mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola oleh Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Provinsi

Jawa Timur merupakan salah satu dari sebanyak 34 Provinsi di Indonesia.

Terdapat 7.724 Desa, 777 Kelurahan, dan 664 Kecamatan yang terbesar di 29

Kabupaten dan 9 Kota. Salah satunya adalah Kabupaten Kediri.

Salah satu Desa di Kabupaten Kediri yang telah mendirikan lembaga BUM

Desa adalah Desa Kerkep, yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda)

Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM

Desa). Keberadaan BUM Desa yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten

Kediri tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang

pembentukan dan pengelolaan BUM Desa, sehingga dapat dijadikan sebagai

penggerak perekonomian masyarakat Desa dan diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa Kerkep yang terletak di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri yang

telah mendirikan lembaga BUM Desa pada Tahun 2017 yang memiliki sebuah

unit usaha Desa Wisata/Pariwisata. Tujuan dari unit usaha tersebut merupakan

wujud sebuah Strategi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam menciptakan

suasana pertumbuhan ekonomi yang baru kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian diatas, telah dijelaskan upaya yang dilakukan

Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti halnya yang

dilakukan oleh Pemerintah Desa Kerkep dalam menerapkan lembaga BUM Desa

sebagai upaya untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. Oleh sebab

itu, dibutuhkan Peran BUM Desa sebagai lembaga yang mengelola sumber

potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa.

Desa Kerkep sendiri memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam Penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui Penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui, Mendeskripsikan, dan Menganalisa terkait dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.
2. Untuk Mengetahui, Mendeskripsikan, dan Menganalisa terkait dengan Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

1.4 Kontribusi Penelitian

Dilihat dari sudut pandang pengembangan ilmu, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*Value*) terhadap semua pihak yang terkait dengan penerapan konsep sinergi yang baik antara masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa melalui lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) baik secara akademis maupun praktis. Adapun Kontribusi dari Penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

- a. Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkenaan dengan yang dijalankan sebagai perwujudan eksistensi suatu lembaga dalam rangka Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa;
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan info pembanding bagi peneliti-peneliti yang telah lalu dan sebagai bahan referensi serta bahan masukan bagi Peneliti yang akan datang dalam judul dan topik yang sama.

2. Kontribusi Praktis

- a. Memberikan kepada Pemerintah Daerah agar lebih memahami secara lebih mendalam mengenai Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang ada di Desa melalui lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);

- b. Mengajak masyarakat sekitar untuk meningkatkan rasa kepedulian, memiliki, dan menghilangkan rasa apatisme terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

3. Kontribusi Bagi Peneliti

- a. Sebagai pengembangan dari ilmu yang telah diterima dibangku perkuliahan;
- b. Sebagai syarat menerima Gelar Sarjana S1;
- c. Salah satu wahana bagi peneliti dalam rangka menambah dan memperluas pengetahuannya, khususnya pada bidang sosial maupun ekonomi serta sebagai sumbangan informasi bagi penelitiannya sepanjang menyangkut objek yang sama, sekalipun dalam ruang lingkup yang berbeda.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi Skripsi ini secara keseluruhan dan mempermudah pemahaman untuk mendapatkan suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdiri dari lima sub bab. *Pertama* akan menjelaskan tentang latar belakang yang mengemukakan tentang permasalahan yang diangkat sehingga dapat dijadikan alasan pemilihan judul penelitian. *Kedua*, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian. *Ketiga*, tujuan penelitian yang

berisikan tentang hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan dalam penelitian. *Keempat*, adalah kontribusi penelitian baik secara akademis maupun secara praktis sebagai bentuk pernyataan tentang hasil penelitian yang akan dilakukan secara lebih spesifik. *Kelima*, adalah sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, diuraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Bab ini menurut kajian pustaka yang berisi tentang konsep dalam teori yang berkaitan dengan permasalahan yaitu tentang Administrasi Publik, penulis menggambarkan permasalahan dalam perspektif Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu, kemudian mengenai Pemerintah Desa lalu penulis memaparkan teori mengenai Ekonomi, Peranan, selanjutnya mengerucut menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dan yang terakhir mengenai Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, berisi tentang langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan peneliti diperoleh. *Pertama*, mengenai jenis penelitian yang merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. *Kedua*, fokus penelitian yang meliputi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan

Ekonomi Masyarakat. Kemudian, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BUM Desa sebagai lembaga yang berperan untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. *Ketiga*, lokasi dan situs penelitian, lokasi penelitian dilaksanakan pada Desa Kerkep, Kecamatan Guruh, Kabupaten Kediri, sedangkan situs penelitiannya pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Desa Kerkep, Kecamatan Guruh, Kabupaten Kediri. *Keempat*, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. *Kelima*, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Keenam*, instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, dan perangkat penunjang lainnya yang meliputi catatan, alat bantu dan utamanya peneliti sendiri juga menjadi instrumen penelitian. *Ketujuh*, analisis data yang menggunakan metode interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan menyimpulkan hasil penelitian yang terdiri dari tiga sub bab, dimana sub bab *Pertama*, akan menguraikan tentang Gambaran Umum Kabupaten Kediri dan Gambaran Umum Pemerintah Desa Kerkep serta Gambaran Umum lembaga BUM Desa. Sub bab *Kedua*, Peran BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, berikutnya mengenai Faktor

pendukung dan Faktor penghambat dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai lembaga yang berperan untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. sementara sub bab yang *Ketiga*, akan menguraikan penyajian data yang telah didapat kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah dipilih sesuai tempat penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan ditarik dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas, sehingga dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa, dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Empiris

Penelitian Empiris adalah segala informasi yang diperoleh melalui eksperimen penelitian atau observasi. Data empiris merupakan data yang disimpulkan dari sebuah temuan penelitian atau eksperimen. Dalam kajian empiris yang disertakan adalah penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian Terdahulu bermanfaat sebagai referensi dalam penelitian, penelitian terdahulu diperlukan untuk mengetahui tingkat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian berbeda dengan studi yang akan diambil oleh peneliti :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Judul, Peneliti, Tahun | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---|-----------------------|---|
| 1. | Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep, Ahmad Nur Ihsan, 2017 | Deskriptif Kualitatif | Keberhasilan BUMDes Gerbang Lentera karena sumberdaya yang baik, dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan potensi-potensi desa yang lainnya. Selain itu adanya dukungan baik dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi hingga Pemerintah Pusat. |

| | | | |
|-----------|---|----------------------------------|---|
| <p>2.</p> | <p>Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, Yoni Pramilu W, Iman Surya, Eddy Iskandar, 2017</p> | <p>Deskriptif Kualitatif</p> | <p>Pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset di BUMDes Amanah sudah berjalan dengan baik. BUMDes Amanah juga mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga BUMDes Amanah mempunyai 3 usaha utama yang sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang bersumber dari BUMDes untuk kegiatan dan pembangunan jembatan.</p> |
| <p>3.</p> | <p>Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Langkitin Desa Langkitan, Rudini, Nurhayati, Afriyanto, 2017</p> | <p>Deskriptif Kualitatif</p> | <p>Dari segi penyajian laporan keuangan yang dibuat BUMDes Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku karena hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan yang seharusnya sebanyak lima jenis laporan keuangan.</p> |
| <p>4.</p> | <p>Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Indonesia (Studi Didesa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, 2017</p> | <p>Deskriptif Kualitatif</p> | <p>Keberadaan BUMDes yang ada didesa Landungsari sebagai penguatan ekonomi desa melalui pembentukan, penyaluran dana, pengembangan usaha dan permodalan peran keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam penguatan ekonomi desa.</p> |

| | | | |
|-----------|--|------------------------------|--|
| <p>5.</p> | <p>Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDES Terhadap Pelaporan Asset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDES Desa Karangbendo Kec Ponggok, Kab Blitar), Dina Irawatil, Diana Elvianita Martanti, 2017</p> | <p>Deskriptif Kualitatif</p> | <p>Diharapkan para aparatur desa khususnya desa Karangbendo dapat meningkatkan dalam pengelolaan laporan keuangan desa berdasarkan kinerja, transparansi, akuntabilitas. Hal ini dapat terwujud dengan adanya keinginan para aparatur desa dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan public yang dapat akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.</p> |
|-----------|--|------------------------------|--|

Sumber : Data Diolah Dari Hasil Penelitian Terdahulu

Kesimpulan dari tabel penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut :

1. Persamaan Dalam Penelitian ini

Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai objek penelitian dan pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan Wawancara, Observasi serta Dokumentasi.

2. Perbedaan Dalam Penelitian ini Adalah Sebagai Berikut :

Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus penelitiannya terletak pada Peran Badan Usaha Milik Desa

(BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat sedangkan fokus penelitian terdahulu terletak pada Pengelolaan, dan Pelaporan Keuangan pada BUMDes.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.3 Administarsi Publik

Administrasi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang memiliki pokok permasalahan (*Subject Matter*) yang tersusun dengan rapi dan terorganisir dengan baik. Administrasi Publik dikelompokkan kedalam ilmu sosial dengan ilmu terapan (*Applied Science*) yang dapat dipelajari dan berkembang terus sampai saat ini.

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata yaitu "*ad*" dan "*ministrate*" yang berarti "*to serve*" yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A.

Dunsire dalam Afriyanto (2014:1) Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai bidang kerja akademik dan teoritik.

Sedangkan Publik merupakan kumpulan sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik

berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi'ie dkk dalam Afriyanto, 2014:1).

Keban dalam Afriyanto (2014:2) menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik memperlihatkan peran pemerintah sebagai penguasa sekaligus regulator yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa yang baik untuk masyarakat. Disisi lain menurut Henry dalam Marfryani (2016:9) menjelaskan, sebagai berikut:

“Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih *responsive* terhadap kebutuhan sosial. Administrasi Publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.”

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Afriyanto (2014:2) ialah proses dimana sumber daya dan personel Publik diorganisasikan dan dikoordinir untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan Publik. Lembaga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

2.3.1 Fungsi-Fungsi Administrasi Publik

Terdapat tiga fungsi utama Administrasi Publik adalah formulasi atau perumusan kebijakan, pengaturan atau pengendalian unsur-unsur Administrasi dan penggunaan dinamika Administrasi. Tjokroamidjoyo, 1991 dalam Tjptiherijianto & Manurung (2010:12).

a. Formulasi Kebijakan

Fungsi ini memiliki empat sub fungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program atau strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan amat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera. Konsistensi tersebut mencakup konsistensi antara waktu atau generasi, antar sektor dan wilayah, antar tingkat pemerintahan dan unit pemerintahan.

b. Pengaturan atau Pengendalian Unsur-unsur Administrasi

Yang perlu dikelola dalam unsur-unsur Administrasi ialah struktur organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lain. Tugas Administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen Administrasi tersebut diatas. Pengaturan atau pengendalian unsur-unsur Administrasi, tidak lain adalah pengelolaan internal Administrasi Publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan kapasitas Administrasi Publik.

c. Penggunaan Dinamika Administrasi

Dinamika Administrasi (*The Dynancis Of Administration*) meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi. Jika pengaturan atau pengendalian unsur-unsur Administrasi Publik, maka penggunaan dinamika Administrasi menekankan pada aspek manajemen dari Administrasi Publik.

2.3.2 Ruang Lingkup Administrasi Publik

Pembahasan ruang lingkup Administrasi Publik, akan dijadikan sebagai ruang lingkup penelitian Administrasi Publik. Menurut Nicholas Henry, 1995 dalam Pasolong (2012:64) dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu Administrasi Publik itu sendiri, antara lain :

- a. Organisasi Publik pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi;
- b. Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia;
- c. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasi, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi;

Berdasarkan ruang lingkup yang dijelaskan oleh nicholas henry dalam pasalong, Administrasi meliputi organisasi Publik sebagai tempat perilaku birokrasi bekerja, melakukan manajemen publik, dan melakukan pengimplementasikan kebijakan publik kepada masyarakat, selanjutnya ruang lingkup Administrasi Publik terbagi menjadi empat komponen Dimock & dimock, 1992 dalam Pasolong (2012:64) yaitu:

- a. Apa yang dilakukan pemerintah: pengaruh kebijakan dan tindakan-tindakan politis, dasar-dasar, wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan Administratif yang bersifat ke dalam, dan rencana-rencana.

- b. Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usaha-usaha; struktur administrasi dari segi formalnya.
- c. Bagaimana para Administrator mewujudkan kerjasama (*teamwork*). Aliran dan proses administrasi dalam pelaksanaan, dengan titik berat pada pemimpin, tuntutan, koordinasi, pelimpahan wewenang, hubungan pusat dengan bagian-bagian, pengawasan, moril, hubungan masyarakat dan sebagainya.
- d. Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab, baik mengenai pengawasan dalam badan-badan eksekutif sendiri, dan yang lebih penting lagi mengenai pengawasan oleh badan-badan eksekutif sendiri, serta pengawasan oleh badan-badan perwakilan rakyat, badan-badan yudikatif, dan berbagai badan lainnya.

Berdasarkan ruang lingkup yang dijelaskan Dimock & dimock dalam Pasolong ruang lingkup Administrasi Publik dapat dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usaha-usahanya, struktur administrasi dari segi formalnya.

Selain itu ruang lingkup Administrasi juga merupakan kerja sama antara para aktor dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut. Sehingga juga merupakan runtutan satu kesatuan dalam menjalankan proses Administrasi Publik.

2.4 Manajemen Publik

Manajemen Publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintahan secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat

ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan.

Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi, (2010:38-40) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta, antara lain sebagai berikut :

1. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintah dimana tuntutan masyarakat yang tinggi sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
2. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
3. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta.
4. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sarana-sarana umum lainnya.

5. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
6. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
7. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Pada pendekatan manajerialisme, fungsi-fungsi strategik seperti perumusan strategi, perencanaan strategik, dan pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajer publik. Manajerialisme sektor publik berorientasi pada pemenuhan tujuan, pencapaian visi dan misi organisasi yang sifat pemenuhannya jangka panjang Mahmudi, (2010:37).

Untuk mewujudkan perubahan menuju sistem manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel. Alison dalam Mahmudi (2010:37) mengidentifikasi ada setidaknya tiga fungsi manajemen yang secara umum berlaku disektor publik maupun swasta antara lain, sebagai berikut :

1. Fungsi strategi, meliputi :
 - a. Penetapan tujuan dan prioritas organisasi;
 - b. Membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan.

2. Fungsi manajemen komponen internal, meliputi :

- a. Pengorganisasian dan penyusunan staff;
- b. Pengarahan dan manajemen sumber daya manusia;
- c. Pengendalian kinerja.

Konsep Manajemen Publik dalam penelitian ini dipaparkan dalam 3 paradigma, yaitu sebagai berikut :

1. Old Public Administration (OPA);
2. New Public Management (NPM);
3. New Public Service (NPS).

2.5 Pemerintah Desa

Dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat Desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dengan pengaturan Desa didalam regulasi sebelumnya. Pandangan masyarakat terhadap Undang-undang ini lebih tertuju kepada alokasi dana Desa yang sangat besar.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah Nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan Pemerintah Desa diatur didalam UU No. 6 Tahun 2014. Adapun penyelenggaraan pemerintah didalam Pemerintahan Desa antara lain sebagai berikut:

1. Definisi Desa

Secara Etimologi, kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif

geografis. Desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of house or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sosiologis Desa merupakan gambaran dari suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal didalam suatu lingkungan dimana mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik corak kehidupan mereka relative homogen serta banyak bergantung dengan alam. Komunitas masyarakat Desa diatas kemudian berkembang menjadi kesatuan hukum dimana terdapat kepentingan penduduk menurut hukum adat yang dilindungi dan dikembangkan Kartohadikoesoemo dalam Ayu dan Syawie, (2015:17).

Rogers dalam Ayu dan Syawie (2015:177-178), mengemukakan ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain, sebagai berikut:

1. *Mutual Distrust Interpersonal Relations*, yaitu adanya rasa tidak percaya secara timbal balik antara petani satu dengan yang lain. Hal ini biasanya terjadi karena anggota komunitas memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas.
2. *Perceived Limited Good*, yaitu pandangan yang sempit dikalangan petani, sehingga hal-hal yang baik dan kesempatan untuk maju selalu terbatas.
3. *Dependence On Hostility Towards Government Authority*, adanya ketergantungan dan sekaligus curiga terhadap pemerintah atau pada unsur-unsur pemerintah.
4. *Familism*, yaitu adanya rasa kekeluargaan, keakraban diantara orang-orang yang memiliki pertalian kekerabatan.
5. *Lack Of Innovations*, yaitu adanya rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru untuk merubah keadaan tersebut perlu adanya *outsider* baik dari pihak pemerintah maupun swasta.
6. *Fatalism*, gambaran mengenai rendahnya wawasan masyarakat Desa dalam melakukan perencanaan kedepan. Mereka cenderung memiliki pemikiran bahwa keberhasilan ditentukan dari kekuatan supranatural bukan dari kerja keras.
7. *Limited Aspiration*, keterbatasan kemampuan beraspirasi atau rendahnya aspirasi sosial masyarakat Desa dalam berinteraksi pada lingkungan sosial.
8. *Lake Of Deferred Gratification*, yaitu kekurangan atau ketiadaan sifat untuk mengekang diri. Masyarakat Desa lebih memiliki untuk mengorbankan kenikmatannya untuk mencapai keuntungan yang lebih besar dimasa depan.

9. *Limited View This World*, yaitu keterbatasan cara pandang masyarakat terhadap dunia luar. Ini disebabkan oleh terbatasnya jangkauan masyarakat dalam mengakses informasi yang datang dari luar.

10. *Low Emphaty*, rendahnya keterampilan menangkap orang lain. Penyebabnya adalah jarak sosio-psikologis dan terbatasnya pengetahuan, dibandingkan masyarakat diluar yang lebih maju.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan dari kompleksitas dalam masyarakat Desa dibutuhkan upaya dan strategi terintegritas melalui pembangunan pedesaan. Menurut Kusmawun dalam Ayu dan Syawie, (2015:180) terdapat beberapa dimensi yang berada didalam kehidupan masyarakat Desa.

Pertama, dimensi kelembagaan Pemerintah Desa. Pada dimensi ini dapat diketahui tingkat ketergantungan kelembagaan Pemerintah Desa terhadap pemerintah diatasnya.

Semakin kecil ketergantungan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangannya, maka Pemerintah Desa tersebut dapat dengan mandiri menjalankan kewenangannya. *Kedua*, dimensi kelembagaan ekonomi masyarakat Desa. Pada dimensi ini, kita dapat mengetahui tingkat kemampuan lembaga ekonomi masyarakat Desa dalam upaya memajukan kondisi perekonomian.

Semakin berjalan fungsi lembaga ekonomi tersebut dalam menjawab semua kebutuhan material masyarakat, maka lembaga ekonomi tersebut semakin mandiri. *Ketiga*, kelembagaan sosial masyarakat, dimensi ini akan memperlihatkan kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Dimensi ini akan menggambarkan nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai universal yang dianut dan dijalankan oleh masyarakat dalam kelembagaan sosial, yang nantinya akan menentukan keberhasilan kelembagaan sosial dalam berperan dimasyarakat. Ketiga dimensi ini nantinya akan menjadi panduan bagi pelaksana program yang berada di Desa.

2.6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.6.1 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sebagai sebuah lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat interaksi masyarakat Desa didalamnya. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dinilai sebagai satu strategi pembangunan ekonomi masyarakat Desa.

Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

BUM Desa berhubungan dengan kegiatan ekonomi, yang serta hubungannya dengan pertumbuhan dan penguatan ekonomi Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUM Desa dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan

a). Inisiatif Pemerintah Desa dan masyarakat Desa; b) Potensi usaha ekonomi Desa; c) Sumber daya alam di Desa; d) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa dan; e) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, BUM Desa didirikan sebagai pertimbangan dari berbagai macam hal. Hal tersebut terkait dengan potensi yang dimiliki oleh Desa, baik potensi ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Proses pertimbangan pendirian BUM Desa dilakukan dengan memaksimalkan peran dari masyarakat Desa. Diperlukan adanya dukungan dari masyarakat Desa dalam pendirian BUM Desa. Sebab BUM Desa sebagai sebuah lembaga, kedepannya akan menjalankan fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Desa.

2.6.2 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Lembaga atau yang disebut juga dengan pranata sosial, ditunjukkan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Searah dengan hal ini, BUM Desa merupakan jenis lembaga yang bergerak dibidang sosial dan bertujuan untuk menata hubungan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa dalam pasal 3, pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan penjelasan diatas yang membahas mengenai tujuan dari pendirian BUM Desa, dapat disimpulkan bawah BUM Desa, memiliki kemanfaatan yang besar untuk masyarakat Desa. BUM Desa juga membantu Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu BUM Desa dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, salah satunya melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Maka dari itu, BUM Desa dapat dijadikan sebagai tulang punggung Desa yang menciptakan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi Desa.

2.6.3 Peran BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Menurut Samadi dkk, (2015:7) Peran BUM Desa adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat Desa. Sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUM Desa sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
5. Membantu para masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, sekaligus meningkatkan kemakmuran masyarakat.

2.6.4 Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

BUM Desa bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat Desa.

Dengan tujuan, untuk mencapai maksud dari pendiriannya, maka BUM Desa diharuskan untuk mendirikan unit-unit usaha tertentu. Unit usaha tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terkait dengan kebutuhan pokok, baik kepada anggota maupun bukan anggota BUM Desa. Menurut Sakina, (2016:40)

BUM Desa dapat menjalankan bisnis sesuai dengan klasifikasi jenis unit usaha seperti dibawah ini:

a. *Serving*

BUM Desa memberikan *Social Benefit* kepada warga, walaupun BUM Desa tidak dapat memperoleh *Economic Profit* yang besar.

b. Banking

BUM Desa dapat menjalankan bisnis uang, yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Desa dengan bunga yang lebih rendah dari pada bunga uang yang didapatkan masyarakat Desa dari para renterir Desa atau bank-bank konvensional.

c. Renting

BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh pendapatan.

d. Brokering

BUM Desa dapat menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar. Selain itu, BUM Desa juga dapat menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

e. Trading

BUM Desa juga dapat menjalankan bisnis tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih baik.

f. Holding

Sebagai usaha bersama BUM Desa, yang memiliki unit-unit usaha yang berdiri sendiri diatur dan ditata sinergitasnya oleh BUM Desa sendiri, dengan tujuan agar unit-unit usaha Desa dapat tumbuh dan berkembang.

Dalam proses perencanaan pendirian BUM Desa terdiri dari sosialisasi hingga penetapan peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa. Segala hal yang terkait dengan perencanaan BUM Desa diputuskan melalui musyawarah Desa. Melalui musyawarah, Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat Desa melakukan diskusi yang terkait dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Desa, jenis unit usaha yang sesuai, pengurus, modal usaha, dan AD/ART BUM Desa. Setelah dilakukan perencanaan pendirian BUM Desa, dan dikeluarkannya Peraturan Desa Tentang Pendirian BUM Desa, maka BUM Desa dapat didirikan dan dikelola.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) muncul sebagai kekuatan ekonomi baru bagi wilayah pedesaan. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan payung hukum atas BUM Desa sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi Desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga Desa.

BUM Desa hadir melalui Peraturan Pemerintah PP No. 72 Tahun 2005 yang dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39 Tahun 2010. BUM Desa berfungsi sebagai wadah usaha milik Desa dan masyarakat sekaligus dapat mengembangkan aset-aset local untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan Desa. Menurut pusat kajian dinamika sistem pembangunan FE UB dalam Hayyuna dkk, (2014:3) BUM Desa

adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang Desa miliki.

2.7 Konsep Manajemen Strategik

2.7.1 Manajemen

Istilah “Manajemen” diartikan oleh para ahli, dengan cara yang bervariasi tergantung latar belakang pengalaman, pendidikan, atau perspektif yang dianut.

Menurut Shafritz dan Russel dalam Keenan, (2014:92) bahwa manajemen berkaitan dengan orang yang bertanggungjawab dalam suatu organisasi menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya (seperti orang dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi.

Dan masih dalam Keenan (2014:92) menurut Donovan dan Jackson melihat manajemen strategi suatu aktivitas yang dilaksanakan dalam jenjang organisasi tertentu, sebagai serangkaian keterampilan (*skill*), dan sebagai serangkaian tugas.

Kedua pengarang ini mengemukakan empat klaster kompetensi yang ada dalam manajemen, yaitu :

1. Klaster manajemen tujuan dan aksi;
2. Klaster pengarahan terhadap bawahan;
3. Klaster manajemen sumber daya manusia; dan
4. Klaster kepemimpinan.

Pygors dan Myeers dalam Keenan, (2014:91) menjelaskan manajemen sebagai “suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain” (*getting things done through other people*). Definisi tersebut mengandung beberapa elemen penting.

Pertama, manajemen adalah proses kerja sama yang mengandalkan sinergisme.

Kedua, proses tersebut dilakukan antara orang-orang yang dipimpin oleh seorang yang berfungsi sebagai manajer atau pimpinan. Dan *Ketiga*, kerja sama tersebut dituntut oleh prinsip-prinsip tersebut terus dievaluasi, disempurnakan dan diimplementasikan kembali sesuai dengan tuntutan zaman. Penyempurnaan dilakukan melalui pergeseran atau perubahan paradigm manajemen.

Fungsi dari manajemen yaitu penekanan pada suatu elemen-elemen yang mana umumnya terdapat pada proses manajemen yang akan menjadi dasar dari manajer dalam melaksanakan kegiatan agar mencapai tujuan. Siagan, (2014:87) menjelaskan dalam buku Filsafah Administrasi, bahwa ada lima fungsi organik manajemen antara lain, sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melihat pengertian tersebut, menjadi jelas bahwa rencana adalah suatu keputusan. Karena rencana merupakan suatu keputusan maka kegunaannya nantinya akan terlihat setelah dilaksanakan. Hal ini memperjelas bahwa kiranya benar, apabila perencanaan ditempatkan sebagai fungsi manajemen yang pertama. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Perencanaan menjadi fungsi organik pertama karena

hal tersebut merupakan dasar dan titik tolak bagi kegiatan pelaksanaan selanjutnya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya pengorganisasian sebagai alat manajemen terlihat apabila diingat bahwa bergerak atau tidaknya organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung atas kemampuan manusia dalam organisasi, menggerakkan organisasi itu ke arah yang telah ditetapkan.

3. Penggerakan (*Motivating*)

Penggerakan (*motivating*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan dan masukan kepada para pahlawan yang berkaitan dengan pekerjaan yang diatur sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan sukarela demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Secara implisit istilah *motivating* termasuk dalam mensinkronisasikan tujuan organisasi dan tujuan-tujuan pribadi anggota organisasi.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Defisini pengawasan yang diutarakan oleh Siagan, (2014:112) yaitu “proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana

yang telah ditentukan sebelumnya”. Dari defisini ini diperjelas bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Artinya bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belahan koin yang sama. Jelas bahwa pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu. Sebaliknya, rencana tanpa pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan atau penyelenggaraan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

5. Penilaian (*Evaluating*)

Penilaian adalah fungsi organik manajemen yang terakhir, definisinya adalah pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

2.7.2 Strategi

Kata strategi dari bahasa Yunani “Stratego” yang berarti merencanakan permusuhan lewat penggunaan sumber-sumber yang efektif”. Menurut Matlof dalam Salusu, (2013:7) Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan.

Dalam hal ini strategi pada umumnya merupakan seni yang menggunakan ilmu menggunakan yang kemudian dikembangkan Malalui kekuatan ideologi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial-budaya dan kekuatan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pengertian strategi secara umum dan khusus, yaitu sebagai berikut :

1. Secara umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan tersebut dapat dicapai.
2. Secara khusus, strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi biasanya selalu dimulai dengan apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan berubah pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*).

Merujuk dari Salusu (2013:7), bahwa pandangan Higgins tentang tingkatan strategi ada empat tingkatan. Dan keseluruhannya disebut *master strategy*, yaitu: *enterprise strategy, corporate strategy, bussines strategy dan fungsional strategi*.

a) *Enterprise Strategy*

Strategi berkaitan dengan respon masyarakat, setiap organisasi memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan orang-orang yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Dalam suatu lingkungan masyarakat yang tidak terkendali itu adalah pemerintah dengan kelompok lain seperti kelompok penekanan, politik dan sosial lainnya, jadi dalam *enterprise strategy* terdapat keterkaitan antara organisasi dan masyarakat yang ada diluar suatu organisasi, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi organisasi yang ada. Strategi itu juga memperjelas bahwa organisasi bekerja keras dan berusaha untuk

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b) *Corporate Strategy*

Strategi ini berhubungan dengan misi organisasi, sehingga biasa juga disebut sebagai *Grand Strategy* yang berhubungan bidang yang digeluti suatu organisasi tentang cara yang digunakan untuk mewujudkan suatu tujuan. Pada umumnya strategi korporasi melibatkan tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan dan investasi keuangan secara langsung.

c) *Bussines Strategy*

Strategi ini menjabarkan bagaimana merebut pasar ditengah-tengah masyarakat. Bagaimana organisasi melekat dihati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua, itu bertujuan untuk dapat memperoleh keuntungan yang strategic sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi pada tingkatan yang lebih baik kedepannya.

d) *Functional Strategy*

Strategi ini memiliki ruang lingkup lebih sempit dibandingkan dengan strategi korporasi dan strategi bisnis. Berhubungan dengan fungsi bisnis seperti fungsi produksi, pemasaran, SDM, keuangan, riset dan pengembangan. Strategi fungsional harus lebih mengarah kepada strategi bisnis dan konsep mereka yang paling utama adalah tergantung pada hasil jawaban tentang cara menerapkannya.

2.7.3 Manajemen Strategik

Menurut Yunus, (2016:18) Manajemen Strategis diartikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang atau perencanaan jangka panjang. Kemudian sebaliknya, mencoba untuk mengoptimalkan kemajuan sekarang untuk masa mendatang.

Definisi Manajemen Strategik yang dikutip dari berbagai ahli diantaranya, menurut Henne Aime dkk, (2010:76) Manajemen Strategik adalah suatu proses yang pada prinsipnya menjamin terlaksananya pengembangan dan implementasi dari strategi yang juga memberi arah pada kegiatan-kegiatan operasional dari organisasi.

Henne Aime dkk, (2010:76) mengemukakan suatu penafsiran generik dan konsep manajemen strategik, yakni manajemen strategik adalah suatu proses manajemen puncak yang mengelompokkan dan mengorientasikan seluruh kegiatan dan fungsi yang ada dalam suatu organisasi serta terfokus untuk diaktualisasikannya agenda strategik dari organisasi tersebut. Adapun tujuan manajemen strategik adalah untuk menciptakan efektivitas jangka panjang organisasi dalam dua lingkungan, yakni pada satu sisi lingkungan kewenangan khusus ataupun cakupan aktivitas dari organisasi. Sedangkan dari sisi lain berupa lingkungan pengembangan kapasitas terhadap keorganisasiannya.

Dengan demikian Manajemen Strategi mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya dengan tujuan mengembangkan diri sesuai dengan pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif dalam menentukan tujuan yang lebih objektif dari organisasi lalu kemudian mengaktualisasikannya, memantau dan dievaluasi.

Maka dari itu, organisasi seharusnya memunculkan ide tentang pendekatan yang holistik terkait manajemen strategiknya, dengan pengertian bahwa:

1. Perhatian dari seluruh organisasi terfokus pada tujuan-tujuan yang telah dipersatukan, fenomena-fenomena maupun permasalahan yang tidak tertangani oleh divisi teknis, serta keberadaan penstrataan yang tidak sama dalam organisasi.
2. Proses serta program manajemen internal terintegrasi dengan raihian hasil yang diharapkan dari organisasi.
3. Keputusan-keputusan operasional dan taktikal yang keseharian itu beresultan dalam garis batas yang lentur demi capaian tujuan-tujuan strategikal jangka panjang dari organisasi.

Manajemen strategis memang sungguh berbeda dengan yang lainnya.

Manajemen strategis selalu menyikapi segala bentuk perkembangan yang terjadi dalam suatu lingkungan tertentu sehingga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen itu sendiri serta berupaya untuk merealisasikan tujuan

yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, berikut ini adalah karakteristik manajemen strategis:

- a) Manajemen strategis bersifat jangka panjang;
- b) Manajemen strategis bersifat dinamik;

- c) Manajemen strategis merupakan suatu yang terpadu oleh manajemen operasional;
- d) Manajemen strategis perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak;
- e) Manajemen strategis berorientasi dan mendekati untuk masa depan; dan
- f) Manajemen strategis senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaan oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia.

Memiliki manfaat, baik secara Finansial maupun Nonfinansial:

1. Manfaat Finansial, yaitu penelitian menunjukkan bahwa suatu organisasi yang menerapkan konsep manajemen strategi akan lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan dengan organisasi yang sama sekali tidak menggunakannya. Bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategis menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan yang sistematis. Perusahaan dengan sistem perencanaan yang sangat mirip dengan teori manajemen strategis, menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang lebih baik dibanding industrinya.
2. Manfaat Nonfinansial, yaitu manajemen strategis juga dapat memberikan manfaat yang nyata, seperti peningkatan kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategi pesaing, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi keengganan untuk berubah, dan pengertian yang lebih baik atas hubungan antara kinerja dan penghargaan.

Manajemen Strategis meningkatkan kemampuan organisasi untuk terhindar dari masalah karena ia membantu interaksi antar manajer disemua bagian dan fungsi. Manajemen strategis dapat memperbaiki kepercayaan atas strategi bisnis saat ini, atau menunjukkan kapan dibutuhkannya tindakan korektif. Menurut Mahmudi, (2004:14) intensitas dan formalitas manajemen strategik berada dari satu perusahaan ke perusahaan lain.

Cukup banyak perusahaan yang menggunakan manajemen strategik secara komprehensif, detail, dan memberikan tekanan pada akurasi. Biasanya dijumpai pada perusahaan besar dan modern karena tersedia dana dan tenaga yang cukup. Lebih banyak lagi perusahaan yang menyusun manajemen strategik secara sederhana dan parsial. Jenis kedua ini lebih banyak dijumpai pada perusahaan kecil dan menengah, yang biasanya tidak memiliki cukup dana dan tenaga ahli. Lebih penting lagi, karena sering kali perusahaan kecil dan menengah belum merasa perlu membuatnya secara lengkap dan terpadu.

Banyak faktor yang mempengaruhi intensitas dan formalitas penyusunan manajemen strategik, diantaranya adalah besarnya organisasi, gaya manajemen kompleksitas lingkungan bisnis, proses produksi, karakteristik persoalan yang dihadapi, tujuan pelaksanaan perencanaan. Secara khusus, faktor besar dan perkembangan organisasi serta metode evaluasi kinerja perusahaan terlihat sangat dominan berpengaruh. Perusahaan kecil cenderung memiliki karakter kewiraswastaan yang lebih menonjol. Biasanya dimiliki oleh seorang dan hanya menghasilkan sedikit jenis produk. Oleh karena itu, manajemen strategik dibuat

dengan sederhana, informal, dan seringkali intuitif. Hal yang sebaliknya dijumpai pada organisasi berskala besar.

Menurut Sedarmayanti, (2014:44) bahwa ketetapan bauran tiga keahlian dasar: teknis, manusia, dan konseptual akan menjamin efektivitas manajemen strategi suatu organisasi.

1. Keahlian teknis, berkaitan dengan suatu hal yang dilakukan dan bekerja dengan sesuatu. Terdiri dari kemampuan dalam menggunakan alat-alat canggih atau teknologi untuk melakukan tugas organisasional.
2. Keahlian manusia, berkaitan dengan bagaimana sesuatu dilakukan dan bekerja dengan orang. Terdiri dari kemampuan untuk bekerja dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan.
3. Keahlian konseptual, berkaitan dengan mengapa sesuatu dilakukan dan cara pandang orang terhadap organisasi secara umum. Terdiri dari kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan karena dengan kompleksitas dapat dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan.

Yunus, (2016:132) mengemukakan bahwa pemilihan suatu strategi dan struktur untuk mengimplementasikannya, para manajer harus mempertimbangkan pengaruh dari luar atau lingkungan eksternal organisasi. Hubungan antara strategi, struktur dan lingkungan dapat dilihat dari beberapa pandangan yang berbeda.

Dalam pandangan pertama, organisasi adalah pertimbangan lingkungan, perumusan strategi yang baik adalah seharusnya memperhatikan lingkungan dimana organisasi akan beroperasi pada waktu mendatang. Strategi ini dapat mempengaruhi struktur organisasi dengan uraian sebagai berikut:

1. Strategi menentukan kegiatan-kegiatan organisasional, yang termasuk desain organisasi yang bersifat pokok. Salah satu contoh adalah adanya kegiatan-kegiatan dengan kreativitas dan kebutuhan teknis tinggi.
2. Strategi sangat berpengaruh terhadap pemilihan dan penggunaan teknologi serta pemilihan orang yang tepat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dan selanjutnya dapat berpengaruh terhadap struktur yang sesuai.
3. Strategi menentukan lingkungan spesifik organisasi akan beroperasi, ini juga mempengaruhi struktur.

2.8 Teori Peranan (Role Theory)

2.8.1 Pengertian Teori Peranan

Perspektif teori ini menyatakan bahwa tingkah laku dibentuk oleh peranan-peranan yang diberikan oleh masyarakat bagi individu-individu untuk melaksanakannya. Teori ini mengakui pengaruh faktor-faktor sosial pada tingkah laku individu dalam situasi yang berbeda. Menurut teori ini peranan yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Oleh karena itu masing-masing peranan diasosiasikan dalam sejumlah harapan mengenai tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima dalam peranan tersebut (*Role Expection*) Arisanti, (2016:38).

Teori ini menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, peran merupakan pemahaman bersama yang membawa kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peranan tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua dan

lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik garis besar bahwa perilaku ditentukan oleh peran sosial Arisanti, (2016:39).

1. Pengertian Peranan

Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang ingin melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan status peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebab, saling bergantung satu sama lain. Pentingnya peranan ialah dapat mengatur perilaku-perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan sekitarnya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. peranan sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku (Soekanto, 2014:210-211).

Peranan yang melekat pada diri seorang individu harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *Social-Position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkainan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang perlakuan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme dari pada spiritualisme. Nilai materialism didalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan didalam kebanyakan hal bersifat konsumtif.

Di dalam interaksi sosial kadangkala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia merupakan tujuan yang dikembangkan oleh para pendamping atau fasilitator. Agar pemberdayaan tidak sia-sia, dapat tepat sasaran, bernilai guna, dan berkelanjutan maka para pendamping masyarakat perlu memahami peranan sebagai berikut. (Sa'adah, 2015:42-44)

a. Fasilitative Role

Di lakukan melalui berbagai pendekatan baik formal maupun informal.

Pendekatan formal mencari informasi tentang kebutuhan masyarakat melalui pertemuan informal seperti rapat pimpinan desa, pertemuan warga, dan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Sedangkan pendekatan informal

antara lain dapat dilaksanakan dengan berbaur dan mengikuti obrolan warga.

Pemberdayaan komunitas sangat tergantung pada potensi lingkungan dari masing-masing komunitas yang akan diberdayakan, sedangkan pemberdayaan individual tergantung pada potensi masing-masing individu.

b. Educational Role

Merupakan bentuk pemberdayaan yang mampu memunculkan inspirasi dan motivasi anggota komunitas untuk berkontribusi secara signifikan terhadap organisasi dan memiliki kepercayaan diri bahwa kontribusi mereka akan dihargai, sehingga mereka merasa hidupnya bermanfaat dan bermakna. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendampingi masyarakat dan menjelaskan pentingnya program-program yang akan dilaksanakan yang nantinya dapat membawa kebaikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu perlu dukungan dari semua pihak.

c. Representative Role

Sejalan dengan perspektif kekuatan, para pendamping masyarakat tidak memandang klien dan lingkungan sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi melainkan mereka yang dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahan masalah. Sebab itu, pemerintah daerah sebagai pendamping serta fasilitator masyarakat harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam program.

d. Technical Role

Melalui *Technical Role* diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara teknis dalam pelaksanaan program pemberdayaan sehingga program dapat

menjadi milik masyarakat, yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan bermanfaat juga untuk masyarakat.

2. Perspektif Peranan

Dalam peranan dan perkembangan teori peran, peran memiliki pendekatan yang digunakan untuk melihat kondisi dan kedudukan peran. Menurut broom dan selzink, peran dapat ditinjau dari tiga perspektif, yaitu *Perspektif Prescribed Role*, *Perspektif Perceived Role*, *Perspektif Actual Role* (Arisanti, 2015:43).

a. Perspektif *Prescribed Role*

Perspektif ini merupakan peran yang disadarkan pada harapan-harapan masyarakat atau peranan yang ideal. Setiap masyarakat pada umumnya selalu mempunyai harapan tertentu yang dimiliki oleh individu yang memiliki status atau posisi sosial tertentu, seperti suami istri, orang tua, dan anak. Harapan itu tentu berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya.

b. Perspektif *Perceived Role*

Perspektif ini didasarkan pada pertimbangan pribadi. Peranan ini mungkin saja tidak sejalan dengan harapan dari masyarakat tetapi tetap harus dilaksanakan walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya, karena menurut pertimbangan hal itu adalah baik.

c. Perspektif *Actual Role*

Perspektif ini didasarkan pada cara pengaktualisasian atau mewujudkan harapan-harapan tersebut. Pelaksanaan suatu peranan seringkali tidak hanya didasarkan atas harapan-harapan masyarakat (*Prescribed Role*) atau pertimbangan-pertimbangan pribadi (*Perceived Role*) tetapi juga berdasarkan

tekanan-tekanan atau peluang-peluang yang dialami. Ada dua macam status dan peran yang dikenal dalam masyarakat, yaitu status dan peran yang ditentukan oleh masyarakat bagi kita, terlepas dari kualitas individu maupun usaha-usaha kita akan dan status peran yang kita perjuangkan melalui usaha kita sendiri.



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, (2016:h3) pengertian metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Sedangkan menurut Subagyo, (1997:h2) adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan.

Didalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarangan metode penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sarana untuk memahami suatu permasalahan secara ilmiah dengan menggunakan metode tertentu yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh berbagai data dan informasi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Pemilihan metode penelitian yang tepat dapat menjamin keakuratan data dan kebenaran dalam memperoleh hasil penelitian. Metode penelitian ini akan mengarahkan peneliti untuk menginterpretasikan data sehingga tujuan penelitian dapat tercapai melalui prosedur sistematis dengan pembuktian yang meyakinkan.

Dengan diketahui bahwa suatu ilmu tanpa metode akan mengurangi kadar ilmiah

itu sendiri sebab metode tidak hanya berfungsi semata-mata sebagai alat pengumpulan data bagi suatu ilmu tetapi juga untuk menguji kebenaran penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara intensif tentang BUM Desa Kerkep dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa serta faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan atau memberi gambaran dan menguraikan keadaan yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang ada, serta berusaha mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Secara umum penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi situasi dan variable yang timbul dilokasi penelitian Bungin dalam Anang, (2015:71). Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisa terkait dengan Peran BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Marfryani, (2016:42) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran secara

holistik dan pemahaman mendalam mengenai permasalahan penelitian.

Pendekatan ini dipilih oleh peneliti dengan alasan untuk memahami Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat yang akan digambarkan secara holistik dengan pemahaman yang mendalam.

Desain dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Desain ini dipilih dengan tujuan agar peneliti dapat menggambarkan dengan kata-kata atau gambar tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Proses ini melibatkan upaya-upaya yang dilakukan peneliti seperti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data secara spesifik dari informan untuk dianalisa secara induktif mulai dari hal yang bersifat khusus sampai hal yang bersifat (Creswell dalam Anang, 2015:72).

Dari berbagai uraian diatas, maka peneliti ini mencoba memandang serta mendeskripsikan secara intensif tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat serta mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BUM Desa dalam mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan elemen yang penting dalam sebuah penelitian, karena hal tersebut dapat menjadi batasan-batasan bagi Peneliti agar tidak melebar dalam membahas dan mengkaji secara mendalam tentang permasalahan yang

diusung, sehingga akan memudahkan Peneliti dalam menentukan data dalam pelaksanaan Penelitian. Berdasarkan uraian dalam perumusan diatas maka penulis membatasi Fokus Penelitian tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, pada :

1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, yang terdiri dari:

a. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Fasilitator

- 1) Strategi perencanaan yang akan dibangun;
- 2) Memfasilitasi pembangunan usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat;
- 3) Pemanfaatan potensi sumber daya alam.

b. Upaya Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat;

1. Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Peran Badan Usaha

Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

a. Faktor pendukung

- 1) Dukungan Pemerintah Desa Kerkep.
- 2) Kerjasama antar Lembaga.

b. Faktor penghambat

- 1) Adanya sebagian masyarakat yang kurang mengerti terkait dengan tujuan berdirinya Lembaga BUM Desa.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian, dan menemukan data yang digunakan dalam penelitiannya serta dapat mempresentasikan permasalahan penelitian yang cakupan wilayahnya lebih luas dari situs penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam Marfryani, (2016:42) menyatakan bahwa ada empat alasan situasi menarik untuk diteliti, yaitu: *pertama*, situasi menarik yang menjadi minat peneliti dan secara nyata teralokasi disuatu tempat. *Kedua*, terdapat pengalaman sosial yang memiliki pola yang tidak tetap. *Ketiga*, adanya keunikan pada individu-individu, jenis *setting* yang tidak pasti, serta banyaknya bentuk pengalaman sosial. *Keempat*, adanya masalah yang telah diteliti sebelumnya dan tidak mendapatkan solusi. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kabupaten Kediri.

2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan letak sesungguhnya, dimana peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini adalah di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang berada di Jl. Pemuda No.45, Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64181, Indonesia. Peneliti tertarik mengambil situs penelitian di BUM Desa, sebab peneliti mempunyai rasa timbul penasaran dengan masalah-masalah yang ada di kehidupan sosial

masyarakat. Sesuai dengan Jurusan Studi peneliti yaitu Administrasi Publik, maka peneliti memfokuskan dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam menangani permasalahan sosial yang sering timbul di kehidupan masyarakat. BUM Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri merupakan badan usaha yang menjalankan usahanya dibidang pariwisata dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai penelitian mendapatkan hasil dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan (Sarwono, 2006:123).

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong, (2011:157) sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan diatas jenis data dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata maupun tindakan orang-orang yang diamati maupun diwawancarai merupakan data utama. Sumber daya utama tersebut dicatat dan dijadikan catatan tertulis maupun dapat pula melalui perekaman video, *tape recorder*, pengambilan foto, atau film. Berbagai data tersebut dapat diperoleh dari *merger* kegiatan mengamati,

mendengar, dan bertanya. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan secara sadar dan terarah karena memang telah direncanakan oleh peneliti.

2. Sumber Tertulis

Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, koran, sumber dari arsip, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi.

3. Foto dan Rekaman *Handycam*

Foto maupun rekaman video akan sangat bermanfaat bagi peneliti. Sebab foto maupun video dapat sekaligus dijadikan bukti nyata dalam pelaksanaan penelitian dan data yang dapat diperoleh lebih relevan. Foto digunakan sebagai data atau sebagai pendorong dalam upaya menghasilkan data, dengan kata lain foto, digunakan sebagai pelengkap pengambilan data terhadap cara dan teknik lainnya.

4. Data Statistik

Pada penelitian kualitatif sering pula menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ini akan menggunakan dua jenis sumber data yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer dengan Sumber Data yang terdiri dari:

a. Kepala Desa Kerkep;

b. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Kerkep

Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;

c. Masyarakat Desa.

2. Data Sekunder dengan Sumber Data:

a. Literatur, Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip Pemerintah Desa dan BUM Desa

b. Data lain yang menunjang, misalnya buku, koran, dokumentasi, internet, jurnal, dan sumber data sekunder lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Silahi dalam Anang, (2015:77) Teknik pengumpulan data merupakan strategi yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data yang berkualitas dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode atau teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti terjun langsung ketempat (obyek/subyek) penelitian, sehingga data yang diperoleh akan benar-benar obyektif dari berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi atau Pengamatan

Kegiatan ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melihat fenomena yang berkaitan dengan permasalahan BUM Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Observasi yang

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung untuk mengamati secara menyeluruh BUM Desa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Wawancara (*Interview*)

Merupakan proses interaksi tatap muka dengan lawan bicara yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan satu subyek tertentu atau orang lain. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara terbuka, sebab peneliti menginginkan jawaban yang mampu menggambarkan secara menyeluruh mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Peneliti menetapkan informan atau narasumber, yang meliputi:

- a) Kepala Desa Kerkep;
- b) Pengurus Lembaga BUM Desa Kerkep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- c) Masyarakat Desa.

3. Dokumentasi

Merupakan salah satu kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan mempelajari data-data sekunder atau melihat dokumen-dokumen yang dianggap relevan pada lokasi dan situs penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian kualitatif, terutama dalam hal penelitian. Instrumen penelitian digunakan peneliti untuk mengambil data, mengelola, menyajikan, dan mendeskripsikan data atau informasi yang digunakan dalam penelitian yang meliputi:

1. Peneliti

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan dan peran peneliti. Penelitian ini seringkali bersifat subyektif. Terlebih dahulu peneliti harus mengenal dirinya sendiri untuk menghindari etnosentrisme yang berkaitan dengan kebudayaan moral, etika, sosial kebiasaan, dan kepercayaan hal tersebut juga dilakukan untuk menghindari subyektifitas peneliti. Dengan cara banyak mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman wawancara ini merupakan alat yang berisi daftar pertanyaan sistematis yang membuat berbagai macam pertanyaan. Pedoman wawancara dalam penelitian ini dibuat berdasarkan fokus untuk menjawab rumusan masalah dengan batas-batas tertentu. Pedoman wawancara dalam penelitian ini dibuat berdasarkan pengklasifikasian informan. Hal tersebut dikarenakan tidak semua informan mampu

menjawab fokus penelitian, sebab setiap organisasi yang masuk didalam informan memiliki batasan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

- a. Catatan lapangan, digunakan untuk mencatat jawaban informan kemudian digunakan kembali dalam menggali jawaban infroman.
- b. Kamera, digunakan untuk mengambil gambar yang nantinya dapat menguatkan atau melemahkan data yang berasal dari informan.
- c. Alat perekam, digunakan untuk merekam proses wawancara yang dilakukan peneliti kepada infroman.

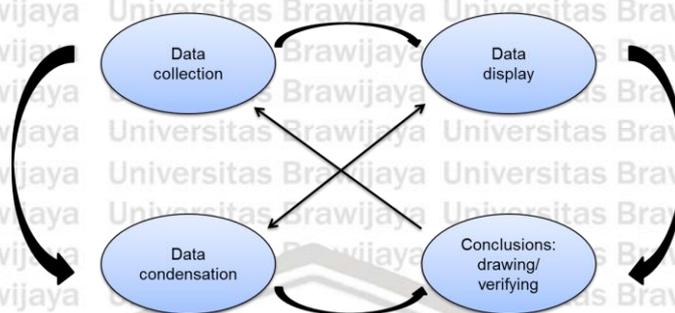
3.7 Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data dari tinjauan pustaka dan penelitian dilapangan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses dalam menemukan data-data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam proses ini merupakan hal yang penting dalam penelitian, sebab akan berpengaruh pada hasil akhir penelitian.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles Huberman dalam Saldana, (2014). Analisis data ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran deskriptif dengan pendekatan induktif mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Oleh karena itu alur yang digunakan peneliti dalam analisis data ini adalah sebagai berikut:

1. *Data Collection*, merupakan kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan dalam menemukan tujuan penelitian yang sesuai dengan jenis dan sifat data.
2. *Data Display*, merupakan proses pemilihan, pemutusan, memfokuskan data kasar yang diperoleh dari penelitian lapangan. Proses ini akan berlangsung selama penelitian yang dilakukan hingga akhir. Reduksi data bukan merupakan bagan yang terpisah dari analisis, dan fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasinya sehingga akan lebih terarah.
3. *Condensation*, pada proses pemilihan, menyederhanakan, memfokuskan, dan mengabstrakkan yang secara umum merupakan sekumpulan informasi terstruktur yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, serta bagan.
4. *Conclusions Drawing/Verification*, merupakan proses terakhir dari model analisis data interaktif. Dalam proses ini data yang telah direduksi dan dirangkai secara sistematis akan ditampilkan, selanjutnya dapat dijadikan kesimpulan.

Menurut Miles Huberman dalam Saldana, (2014:12-14) analisis terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.



Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles Huberman dalam Saldana, (2014:12-24)

Pada gambar tersebut terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi, yaitu data *condensation* (Kondensasi Data), *data display* (Penyajian Data), *conclusions drawing/verifying* (Pengarikan Kesimpulan/Verifikasi). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu proses pemilihan, pemfokusan, penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan yang ditulis dilapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya.

Dengan kondensasi data kita membuat data yang semakin kuat. Sebagai proses pengumpulan data, episode selanjutnya adalah kondensasi data yang terdiri dari menulis ringkasan, mengkode, pengembangan tema, pengkategorikan, dan menulis analisis. Kondensasi data/proses transformasi berlanjut terus sampai penelitian dilapangan berakhir, sampai penulisan laporan. Kondensasi data merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari analisis. Kondensasi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Langkah kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, penyajian merupakan langkah yang terorganisasi, meringkaskan penemuan informasi yang memungkinkan adanya penggambaran kesimpulan dan tindakan yang seharusnya dilakukan. Dalam program kerja, penyajian data yang baik merupakan cara utama untuk menguatkan analisis interaktif. Dalam buku ini penyajian data mendiskusikan dan menggambarkan banyak jenis matriks, grafik, diagram, dan jaringan. Semua dirancang untuk merakit informasi secara terorganisir untuk dapat diakses, bentuk yang padu menjadikan analisis dapat dilihat dari kejadian yang nantinya akan menggambarkan kesimpulan atau berlanjut kelangkah selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mulai dari pengumpulan data, mengartikan/menafsirkan analisis kualitatif dengan melakukan pencatatan pola, menjelaskan aliran/arus, dan tujuan dari penelitian. Sehingga peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan. Makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

3.8 Keabsahan Data

Penggunaan keabsahan data sangat penting dalam penelitian sebab pembaca juga perlu mengetahui proses yang digunakan dalam penelitian agar dapat

memperoleh data yang valid. Obyektivitas dan keabsahan data dapat dilihat dari realibilitas dan validitas data yang diperoleh selama proses penelitian. Keabsahan data dalam penelitian ini akan dibuktikan dengan uji validitas dan realibilitas, sebab yang utama dalam penelitian kualitatif adalah *valid*, *reliable*, dan obyektif. Menurut Moleong, (2009:327) teknik pemeriksaan data merupakan “Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit kebergantungan, dan audit kepastian.”

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang meliputi:

1. Perpanjangan Waktu Penelitian

Dalam proses penelitian yang belum menemukan titik terang, peneliti akan menambah waktu penelitian, sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan digunakan peneliti untuk membangun kepercayaan subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. Waktu yang digunakan peneliti untuk menemukan titik jenuh ialah 3 Bulan.

2. Ketekunan Pengamatan

Artinya peneliti diharuskan mencari interpretasi dengan berbagai cara yang berkaitan dengan proses analisis konstan atau tentavie. Ketekunan pengamatan menggunakan seluruh panca indera, sehingga dapat meningkatkan derajat keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data

menggunakan ketekunan pengamatan, dilakukan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan.

3. Triangulasi

Menurut Denzim dalam Marfyani, (2016:55) terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data, *Pertama* memanfaatkan peneliti untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data. *Kedua*, triangulasi dengan sumber data yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan. *Ketiga*, triangulasi dengan metode untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Keempat*, triangulasi dengan menggunakan teori untuk mengurangi pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan dari analisis yang berguna untuk mencari penjelasan pembanding.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari kebenaran secara ilmiah. Penelitian adalah kegiatan untuk mencari, menemukan pengetahuan dari lapangan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut kaidah-kaidah ilmiah Suryanto, (2011:1). Sedangkan metode menurut Surbakti dalam Suryanto, (2011:273) adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Metode berfikir ilmiah adalah suatu pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana mencapai suatu tujuan berfikir yang optimal definisi tersebut diungkapkan oleh Surjana dalam Suryanto, (2011:3). Dalam bab ini menjelaskan

tentang Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Pengumpulan Data, Instrument Penelitian dan Analisis Data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kediri

Kediri merupakan salah satu Daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan memiliki 26 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 343 desa. Hal ini tercantum dalam gambar dibawah ini, peta Kabupaten Kediri sebagai berikut:



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kediri

Sumber : www.kedirikab.go.id

Pada bagian ini, penulis juga menjelaskan terkait Kondisi Umum Daerah Kabupaten Kediri, letak dan kondisi daerah kabupaten kediri, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi dan penggunaan lahan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat berikut ini:

1. Kondisi Umum Daerah

Kediri merupakan salah satu wilayah penting dalam sejarah Indonesia, karena karena termasuk dalam satu wilayah kerajaan di masa lampau yaitu Kerajaan Kediri. Tetapi sekarang ini Kediri telah terbagi menjadi wilayah administratif dengan batas-batas tertentu. Wilayah tersebut terbagi menjadi Kabupaten Kediri dan Kota Kediri.

Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.386,05 KM² atau 138.605 Ha yang terbagi menjadi 26 Kecamatan, serta 343 Desa dan 1 Kelurahan. Sebelum tahun 2004 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 23 Kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 dibentuk tiga Kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari tiga kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Kayen Kidul, pemekaran dari Kecamatan Pagu.
- b. Kecamatan Badas, pemekaran dari Kecamatan Pare dan.
- c. Kecamatan Ngasem, pemekaran dari Kecamatan Gampengrejo.

Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Kediri sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.

2. Letak dan Kondisi Daerah

Kondisi didaerah terebut terbagi menjadi empat yaitu Kondisi Geografis, Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi.

- a. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Kediri secara geografis terletak pada koordinat antara $111^{\circ} 47' 05''$ s/d $112^{\circ} 18' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ s/d $8^{\circ} 0' 32''$ Lintang Selatan.

b. Kondisi Topografi

Berdasarkan topografinya, Kabupaten Kediri dibagi menjadi 4 (empat) golongan dari luas wilayah, yaitu: ketinggian di atas 0-100 meter dpl membentang seluas 32,45%, ketinggian diatas 100 meter – 500 meter dpl membentang seluas 53,83%, ketinggian diatas 500 meter-1.000 meter dpl membentang seluas 9,98%, dan ketinggian diatas 1.000 meter dpl membentang seluas 3,73%.

c. Kondisi Geologi

Secara geologis karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a) Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng

Gunun Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur;

b) Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintasi aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelahi wilayah Kabupaten Kediri; dan

c) Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gubung Kelud di bagian selatan.

3. Kondisi Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Kediri mengalir banyak sungai ataupun saluran alam, dimana sungai yang memiliki debit air yang cukup besar dan mengalir sepanjang tahun meliputi Kali Brantas, Kali Konto, Kali Bakung, Kali Kolokoso, Kali Turitnggorono, Kali Bangi Dan Kali Sedayu. Sementara sungai-sungai lainnya umumnya berupa sungai musiman yang hanya mengalir pada musim penghujan, sementara pada musim kemarau sungai tersebut kering atau tidak berair. Potensi air tanah sungai-sungai ini sebelum sampai ke Sungai Brantas telah dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pengairan sawah/irigasi bagi pemerintah.

4. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim pada wilayah Kabupaten Kediri pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yaitu secara umum beriklim tropis dengan dua musim. Kondisi iklim rata-rata Kabupaten Kediri, yaitu:

- a) Suhu maksimum rata-rata 30,70C pada musim kemarau dan suhu minimum rata-rata 23,80C, sedangkan pada musim penghujan atau suhu rata-rata setahunnya sebesar 27,20C.
- b) Kelembapan udara rata-rata 85,5% per tahun, sementara kelembapan nisbi antara 74-86%.
- c) Kecepatan angin rata-rata pada musim kemarau antara 12-13 knots dari pada musim penghujan rata-rata kecepatan angin sebesar 17-20 knots.

- d) Musim kemarau berlangsung selama 6-7 bulan yaitu sekitar bulan Mei-November, sementara musim penghujan berlangsung selama 4-5 bulan yaitu pada bulan Desember-April setiap tahunnya.
- e) Curah hujan rata-rata pertahunnya sebesar 130-150 mm, dengan jumlah hari hujan rata-rata selama 6-15 hari.

5. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan didominasi untuk lahan pertanian tanaman pangan (sawah) seluas 46,981 Ha atau 34,19% dari total luas wilayah. Berikutnya, penggunaan untuk lahan pekarangan dan bangunan seluas 30,221 Ha (21,99%), Tegal dan kebun seluas 28,343 Ha (20,62%), Hutan negara seluas 16,401 Ha (11,93%), Perkebunan Rakyat seluas 8.934 Ha (6,50%), Tambak seluas 24 Ha (0,02%), dan lain-lain seluas 6,323 Ha (4,60%).

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kediri

1. Visi Kabupaten Kediri

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter nasionalis-religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyataan yang didukung birokrasi yang melayani.

2. Misi Kabupaten Kediri

- Pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter nasionalis-religius;
- Reformasi birokrasi dan Pelayanan Publik;
- Pengembangan ekonomi kerakyataan dan peningkatan investasi daerah;
- Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan;

- e) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
- f) Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, sumber daya alam, dan mitigasi bencana;
- g) Pengembangkan seni budaya, olahraga dan kreativitas pemuda; dan
- h) Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat.

4.2 Gambaran Umum Desa Kerkep



Gambar 4.2 Peta Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri

Sumber: Pemerintah Desa Kerkep

1. Letak Geografis Desa Kerkep

Desa kerkep termasuk dalam wilayah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Di sebelah Utara Desa Kerkep berbatasan dengan Desa Gempolan Kecamatan Gurah. Kemudian disebelah Selatan, Timur, dan Barat berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Gurah. Desa Kerkep secara geografis terletak didataran rendah dengan laus wilayah menurut

penggunaan 72,71 ha, yang terbagi atas luas tanah sawah 40,15 ha, luas tanah kering 18,45 ha, dan luas fasilitas umum 14,12 ha.

2. Topografis

Desa Kerkep sebagian besar meruapakan daerah dataran rendah, dengan curah hujan rata-rata 50,00 mm/th. Bentuk permukaan tanah di Desa Kerkep secara umum adalah datar dengan produktifitas tanah adalah baik/sedang dan keadaan wilayah bukan pantai.

3. Demografis

Desa Kerkep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri memiliki jumlah penduduk 1520 jiwa yang terdiri dari 759 Laki-laki dan 761 Perempuan. Kondisi sosial budaya, masyarakat di Desa Kerkep mayoritas beragama Islam dengan Jumlah Penduduk 1520 jiwa, khatolik 3 jiwa. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Kerkep adalah Petani yang berjumlah 550 Orang, Buruh Tani 310 Orang, Wiraswasta/dagang 320 Orang, Buruh Bangunan 120 Orang, Pekerja Swasta Lainnya 217 Orang, PNS 87 Orang, ABRI/TNI/POLRI 6 Orang, penjahit 24 Orang, Jasa 170 Orang, Pensiunan 4 Orang.

a) Sarana pendukung

1. Sarana pendidikan

Desa Kerkep mempunyai sarana pendidikan mulai dari Play Group, TK sampai dengan SMP, dengan total keseluruhan 605 Murid yang berasal dari Desa Kerkep dan Desa-desa disekitar

Kecamatan Guruh. Demikian pula dengan Pengajar yang berjumlah 46 Orang Guru yang terdapat di Desa Kerkep.

2. Struktur Pemerintah Desa Kerkep

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kerkep mengacu pada Peraturan Desa No.1 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kerkep yang berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Perdes ini disusun dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Desa Kerkep.

4. Visi dan Misi Pemerintah Desa Kerkep

a. Visi Desa Kerkep

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau di cita-citakan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dimassa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Pemerintah Desa Kerkep adalah sebagai berikut:

Desa Kerkep merupakan Motto KARTINI, yang mempunyai maksud upaya tiap warga menciptakan suasana yang:

1) Kreatif

Terciptanya potensi masyarakat yang mengandalkan kemampuan sumber daya masyarakat Desa Kerkep untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat.

2) Agamis

Terciptanya kerukunan antar umat beragama di Desa Kerkep yang saling hormat menghormati, sehingga tidak melahirkan kesalah pahaman. Karena masing-masing sudah memiliki mental spiritual yang tinggi.

3) Responsif

Meningkatnya kepekaan sosial antar elemen masyarakat Desa Kerkep, karena dapat berpartisipasi aktif di bidang Pemerintah, Pembangunan, Pertanian, Pendidikan, dan Kesehatan.

4) Tertib

Melahirkan kesadaran masyarakat Desa Kerkep untuk menciptakan tertib hukum, tertib administrasi dan tertib lingkungan menuju kesadaran berbangsa dan bernegara.

5) Inspiratif

Menggali potensi masyarakat, meningkatkan peran serta pengembangan sumber daya manusia Desa Kerkep, sehingga dapat berdaya saing ditingkat regional maupun ditingkat nasional.

6) **Ngayomi**

Menanggulangi kemiskinan, mengupayakan kesehatan, meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan pendidikan dan melindungi yang lemah demi terciptanya masyarakat Desa Kerkep yang harmonis.

7) **Inovatif**

Menciptakan terobosan percepatan pembangunan Desa dengan percepatan ekonomi kerakyatan Desa Kerkep, sebagai upaya peletakkan dasar industrialisasi pedesaan dengan tidak meninggalkan kritik, dan saran kaum terpelajar serta sumbangsih kaum dermawan.

b. **Misi Pemerintah Desa Kerkep**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran Desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa Desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh Pemerintah Desa.

Untuk mewujudkan Visi Desa tersebut diatas, maka Pemerintah Desa Kerkep menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan jalan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara, meningkatkan kesetakawanan sosial dan kegotong royongan serta pembudayaan hidup rukun antar keluarga.
- 2) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan keluarga dalam upaya peningkatan pendidikan bangsa serta upaya peningkatan penghasilan/pendapatan keluarga menuju peningkatan kesejahteraan keluarga.
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan keluarga melalui diversifikasi pangan dan peningkatan keterampilan pengolahan pangan.
- 4) Membudayakan hidup berencana untuk kepentingan keluarga dan perencanaan ekonomi keluarga yang hemat, sederhana dan melatih membiasakan seluruh anggota keluarga untuk menabung.
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan keluarga melalui diversifikasi pangan dan peningkatan keterampilan pengolahan pangan.

4.3 Gambaran Umum BUM Desa Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri

BUM Desa merupakan Institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Kerkep serta masyarakat mengelola Institusi tersebut berdasarkan kebutuhan

Desa. BUM Desa dibentuk berlandaskan atas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat Desa, tujuan pendirian BUM Desa, Desa kerkep adalah untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.



Gambar 4.3 Logo BUMDes Desa Kerkep, Kecamatan Guruh, Kabupaten Kediri

Sumber: Dokumentasi Pribadi

4.3.1 Struktur Organisasi BUM Desa

BUM Desa sebagai Badan Usaha Milik Desa, tentu memiliki struktur organisasi guna bejalannya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kejelasan struktur organisasi maka BUM Desa bisa melakukan pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik satu dengan yang lainnya. Keberadaan struktur didalam sebuah organisasi seperti BUM Desa berfungsi untuk menjalankan “Perusahaan” dalam hal ini BUM Desa beserta unit usaha BUM Desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari pada masing-masing jabatan atau posisi yang ada.



Gambar 4.4 Struktur Organisasi BUMDes Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri

Sumber: Dokumentasi Pribadi

4.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan unsure pelaksana urusan pemerintah Desa dibidang usaha yang ada didalam Desa. BUMDes dipimpin oleh komisaris BUMDes sekaligus kepala Desa. Di dalam BUMDes tersebut terdapat beberapa susunan yang terdiri dari :

1. Pengawas BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Pengawas BUMDes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa. Pengawas juga bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUMDes. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun;

- b. Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan bumdes baik usaha yang berbadan hukum privat dan tidak berbadan hukum privat;
- c. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/Pelaksana Operasional.

2. Komisaris BUM Desa

Penasehat atau Komisaris BUMDes mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa. Komisaris BUMDes juga mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berdasar visi dan misi dalam RPJM Desa. Tugas, Hak dan Kewajiban Komisaris BUMDes lainnya, berdasarkan pembahasan dan sepakat yang disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD, dan hasilnya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

3. Sekretaris BUM Desa

Sekretaris BUMDes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan Administrasi usaha BUMDes. Tugas Bendahara BUMDes, diantaranya sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur;
- b) Melaksanakan Administrasi umum kegiatan operasional BUMDes;

- c) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi Administrasi setiap unit usaha BUMDes;
- d) Melaksanakan Administrasi pembukuan keuangan BUMDes;
- e) Menyusun Administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes;
- f) Mengelola surat menyurat secara umum;
- g) Melaksanakan kearsipan; dan
- h) Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes.

4. Bendahara BUM Desa

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDes. Tugas Bendahara BUMDes, antara lain sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDes;
- b) Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes;
- c) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes;
- d) Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes;
- e) Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDes;
- f) Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes;

- g) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya;
- h) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- i) Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan; dan
- j) Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

5. Manajer Unit Usaha BUMDes

Kepala atau manajer unit usaha BUMDes mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi Desa dan kebutuhan masyarakat. Tugas Manajemen Unit BUMDes, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

- a) Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- b) Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya;
- c) Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik;
- d) Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha;
- e) Berkoordinasi dengan Direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan;
- f) Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha dan laporan keuangan kepada Direktur dan Bendahara; dan

- g) Membangun jaringan kerja usaha unit terhadap pihak-pihak terkait dan melaporkan hasilnya kepada Direktur.

4.3.3 Visi dan Misi BUM Desa, Desa Kerkep

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Asset Desa, maka dalam hal ini visi BUM Desa, Desa Kerkep yaitu untuk mewujudkan suatu pemerataan atau peningkatan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan usaha yang ada didalam BUM Desa yang nantinya mampu memberikan dampak suatu Desa yang Mandiri dari segi Ekonomi. Visi dan Misi BUM Desa, Desa Kerkep antara lain sebagai, berikut:

1. Visi BUM Desa, Desa Kerkep

Mewujudkan Kemandirian Desa melalui pembangunan ekonomi yang bermartabat sesuai tata nilai budaya dan kelestarian lingkungan. Demi terwujudnya Desa yang berdikari, mandiri, demokrasi dan sejahtera.

2. Misi BUM Desa, Desa Kerkep

- a) Menggali dan mengembangkan potensi-potensi perekonomian Desa dalam upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan pencapaian lapangan kerja;
- b) Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal agar memiliki nilai tambah secara ekonomi;
- c) Menjadi pelopor pembangunan ekonomi Desa yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup;

- d) Mengembangkan jaringan kemitraan dalam rangka membangun perekonomian Desa berdasarkan prinsip-prinsip BUM Desa
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perekonomian Desa;
- f) Memberikan pelayanan terbaik terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga masyarakat Desa;
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi Desa dan berorientasi pada kearifan lokal.

(Sumber: BUM Desa, Desa Kerkep)

4.4 Penyajian Data

4.4.1 Peran BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Berbicara mengenai peranan, peranan dapat diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh orang atau badan yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan peranan dapat mempengaruhi nilai-nilai (*Values*) yang terdapat didalam masyarakat dan mempengaruhi arah dari pertumbuhan serta perkembangan kepribadian dalam masyarakat tersebut.

BUM Desa merupakan sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro Desa yang dikelola oleh masyarakat bersama dengan Pemerintah Desa. Pengelolaan BUM Desa terpisah dari kegiatan Pemerintah Desa diluar struktur organisasi Pemerintah

Desa. Badan ini juga dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

Tabel 4.1 Prioritas Program BUM Desa Tahun 2020

| No. | Uraian | Lokasi | Volume | Manfaat |
|-----|---|------------|---|---|
| 1. | Pemberdayaan Masyarakat dibidang UMKM. | Ds. Kerkep | PKK Desa Kerkep. | Meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan dibidang UMKM serta pemasaran produk. |
| 2. | Pelatihan Pengelolaan Budidaya Jamur Tiram. | Ds. Kerkep | Pemuda/Pemudi Karang Tarunan Desa Kerkep. | Meningkatkan kualitas kemampuan pemuda/ pemudi karang taruna terkait dengan pengelolaan budidaya jamur tiram. |
| 3. | Pelatihan Pengelolaan dibidang Sablon Custom. | Ds. Kerkep | Pemuda/Pemudi Karang Tarunan Desa Kerkep. | Memberikan kualitas kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan sablon custom serta pemasaran produk. |
| 4. | Pelatihan Pengelolaan Keuangan pada BUM Desa. | Ds. Kerkep | Pengurus/ Pengelola BUM Desa. | Memberikan pengetahuan serta wawasan yang luas terkait dengan tata kelola keuangan. |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|----------|--|
| | | | | |
| 5. | Pengembangan Desa Wisata/Pariwisata. | Ds. kerkep | 1 Paket. | Menciptakan suasana pertumbuhan ekonomi yang baru kepada masyarakat melalui pengembangan pengelolaan Desa Wisata/Pariwisata serta mengurangi jumlah pengangguran yang ada dimasyarakat Desa. |
| 6. | Dst. | | | |

(Sumber: Prioritas program BUM Desa, Desa Kerkep Tahun 2020)

4.4.2 Peran BUM Desa sebagai Fasilitator

Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, BUM Desa secara keseluruhan harus memfasilitasi segala aktivitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat.

a. Perencanaan atau strategi yang akan dibangun

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerjasama antar Desa. BUM Desa tidak hanya sekedar mencari untung tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat serta merencanakan kegiatan usaha yang akan digeluti. Fokusnya pada potensi,

peluang dan kapasitas yang ada dimasing-masing Desa yang akan bersinergi dengan berbagai bidang. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bondhan Wijokangko selaku Komisaris BUM Desa.

“...Terkait dengan strategi perencanaan yang akan dibangun, sementara ini program yang dijalankan oleh BUM Desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui unit usaha Desa Wisata/Pariwisata BUMDes mas, program ini sudah berjalan tetapi masih dalam tahap proses pembangunan. Tujuan dari program tersebut ialah tentu saja yang *pertama* sebagai wadah penyaluran kreatifitas masyarakat yang akan dijual ditempat wisata yang *kedua* menciptakan suasana pertumbuhan ekonomi yang baru yang *ketiga* untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes).”
(Wawancara pada hari Senin, 14 Juni 2021, pukul 10.30 WIB, di Kantor Desa Kerkep).

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Bondhan Wijokangko dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Strategi yang diberikan oleh BUM Desa mampu memberikan dampak yang positif. Solusi dan Strategi Perencanaan yang akan diberikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa dan pengurus lembaga BUM Desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan.



Gambar 4.5 Wawancara Bersama Komisaris BUMDes Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 4.6 Fasilitas Desa Wisata/Pariwisata BUM Desa

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 4.7 Mapping Proses Pembangunan Desa Wisata/Pariwisata

Sumber: Dokumentasi Pribadi

b. Memfasilitasi Pembangunan Usaha Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

BUM Desa dalam kegiatannya dapat memfasilitasi beberapa kelompok kerja, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Peneliti kepada Ibu R selaku salah satu pemilik usaha.

“...Kalau fasilitas ada mas, saya ambil contoh seperti outlet tempat jualan saya di tempat wisata itu dulu di siapkan oleh BUM Desa, kalau terkait dengan sistemnya sebelumnya dari pihak BUM Desa sendiri sudah menyiapkan 7 outlet di tempat wisata, tetapi outlet ini berbayar mas tidak gratis terkait dengan harga outlet tersebut kisaran Rp.1.500.000 per outletnya, kalau sistem pembayaran bisa diangsur selama jangka waktu 1 tahun, namanya juga tempat wisata mas ya kadang sepi kadang ramai hasil pendapatan tidak selalu pasti atau konsisten.”(Wawancara pada Hari Jum’at, 27 Agustus 2021, pukul 08.30 WIB, di Desa Kerkep).

Berdasarkan penjelasan dari Ibu R selaku salah satu pemilik usaha dapat disimpulkan bahwa adanya Peran BUM Desa dalam memfasilitasi pembangunan usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Ina Prasetyawati selaku Bendahara BUM Desa.

“...Kalau terkait fasilitas, dari pihak BUM Desa sendiri sebagai fasilitator sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat mas, seperti fasilitas-fasilitas outlet ditempat wisata itu merupakan rasa kepedulian dari pihak BUM Desa untuk lebih mementingkan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi. Sebenarnya terkait fasilitas bukan hanya outlet ditempat wisata ya mas, dulu juga pernah waktu pelatihan

budidaya jamur tiram yang dikelola oleh karang taruna dari pihak BUM Desa sendiri juga memfasilitasi berupa lokasi/tempat untuk melaksanakan praktik budidaya jamur tiram, tetapi budidaya jamur tiram tersebut sudah tidak berjalan mas karena adanya kendala dari anggota karang taruna yang semakin lama semakin berkurang dan pemasaran produk hasil panen yang terlalu sulit.” (Wawancara pada Hari Jum’at, 27 agustus 2021, Pukul 10.00 WIB, di Kantor BUMDes Desa Kerkep).



Gambar 4.8 Wawancara Bersama Bendahara BUM Desa

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 4.9 Outlet Tempat Jualan Masyarakat Desa Kerkep di Lokasi Tempat Wisata

Sumber: Dokumentasi Pribadi

c. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat Desa,

mengembangkan potensi Desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam Desa, mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya dan adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUM Desa.

Untuk BUM Desa Desa Kerkep bersama Pemerintah Desa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam saat ini sudah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa melalui potensi Desa yang dimiliki oleh Desa Kerkep. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bondhan Wijokangko selaku Komisaris BUM Desa.

“...Sementara ini kegiatan BUM Desa masih saya fokuskan untuk mengelola Desa Pariwisata mas, sambil menunggu proses penambahan wahana tempat wisata, BUM Desa juga sudah mempunyai penghasilan sendiri mas dari tempat wisata sebesar Rp.1.000.000 perbulannya. Penghasilan tersebut sementara ini masih mengambil dari tiket masuk Rp.2000 per orang dan parkir sebesar Rp.3000 jadi total Rp.5000 untuk masuk ditempat wisata, kan sementara ini ada juga beberapa masyarakat yang sudah berjualan ditempat wisata, penghasilan yang mereka dapatkan perbulannya sebesar Rp.500.000 - 800.000 itupun tidak pasti namanya juga tempat wisata mas ya kadang sepi kadang ramai cuman berdasarkan laporan yang saya terima bisa saya katakan rata-rata sementara penghasilan mereka segitu mas, sambil terbukanya tempat wisata tidak lupa protokol kesehatan tetap dijalankan mas ditempat wisata”.(Wawancara pada Hari Jum’at, 25 Juni 2021, pukul 09.00 WIB, di Kantor Desa Kerkep).



Gambar 4.10 Sumber Desa Wisata/Pariwisata Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 4.11 Kolam Renang Anak Desa Wisata/Pariwisata Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 4.12 Tiket Masuk Kawasan Desa Wisata/Pariwisata

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan hasil pemaparan yang dijelaskan oleh Bapak Bondhan Wijokangko, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Desa Wisata/Pariwisata yang akan dikembangkan dapat

meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa, serta dapat berkontribusi besar bagi Pendapatan Asli Desa (PADes).

Melalui Desa Wisata/Pariwisata yang akan dikembangkan nantinya dapat dikelola dengan baik.

4.4.3 Upaya BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

a. Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan

Dalam organisasi maupun lembaga, diperlukan adanya suatu perbaikan dan peningkatan guna menjaga keberlangsungan sebuah organisasi. Untuk mencapai keadaan tersebut dibutuhkan perencanaan, penataan dan bimbingan dalam mewujudkan suatu perubahan nilai, fungsi, teknologi fisik dan sosial. Selain itu, pembangunan kapasitas (*Capacity Building*) dapat berperan sebagai dedikasi penguatan ekonomi, pemerintah, lembaga serta individu melalui pendidikan, pelatihan, mentoring dan pemasukan sumber, BUM Desa, Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri sudah menunjukkan adanya suatu perbaikan yang dijelaskan oleh Bapak Tomi Selaku Pengelolaan BUM Desa.

“...Kalau terkait dengan penguat kapasitas kelembagaan, dulu awal mula BUM Desa ini didirikan pada tahun 2017 peran BUM Desa kepada masyarakat belum maksimal mas karena dari pihak Pemerintah Desa sendiri semata-mata mendirikan BUM Desa hanya untuk menutupi kekurangan kelembagaan yang ada di Desa dan dari pihak Pemerintah Desa sendiri masih terfokus untuk menjalankan program pembangunan yang ada di Desa. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan adanya potensi

yang akan dikelola akhirnya dari pihak Pemerintah Desa sendiri melibatkan BUM Desa untuk mengelola potensi tersebut, disini peran BUM Desa kepada masyarakat pelan-pelan mulai kelihatan mas, seperti melibatkan masyarakat dalam kegiatan operasional BUM Desa, memonitoring, memfasilitasi usaha masyarakat, dll. Ya meskipun ada sebagian masyarakat yang belum mengerti terkait dengan tujuan berdirinya lembaga BUM Desa mas ya, tetapi harapan dari rekan-rekan BUM Desa sendiri lewat jalur pengembangan potensi yang ada di Desa dengan melibatkan masyarakat mampu memberikan pengetahuan dan wawasan terkait dengan apa dan maksud lembaga BUM Desa ini didirikan". (Wawancara pada Hari Jum'at, 27 agustus 2021, Pukul 09.00 WIB, di Kantor BUMDes Desa Kerkep).

4.4.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Peranan BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat tentunya terdapat faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi pendukung serta menjadi penghambat BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung ialah faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam Peranan BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Faktor pendukung yang akan peneliti bahas adalah faktor pendukung yang berasal dari Pemerintah Desa. Hal tersebut juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang ikut menyumbangkan aspirasi,

motivasi, dan solusi bagi BUM Desa agar menjadi maju dan berkembang.

1) Dukungan Pemerintah Desa Kerkep

Dalam upaya pembangunan, kedudukan Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting bagi BUM Desa dan seluruh masyarakat Desa. Peranan tersebut dapat terbentuk sebagai dukungan dan bantuan kepada BUM Desa. Dukungan dan bantuan yang kuat dari Pemerintah Desa tentunya juga akan memperkuat BUM Desa dalam melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Seperti halnya dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kerkep terhadap BUM Desa. Pemerintah Desa Kerkep memberikan dukungan dan bantuan terhadap pengembangan BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andhik selaku Ketua BUM Desa.

“...Sebelumnya memang dari pihak Pemerintah Desa dan BUMDes memiliki komunikasi yang kurang mas, tapi dengan adanya kemauan dan niat untuk berusaha mengembangkan potensi Desa melalui BUMDes, keduanya mulai menjalin kerjasama antar pengurus/pengelola BUMDes dan Pemerintahan Desa. Demi terciptanya potensi yang dimiliki oleh Desa yang dimana bisa memberikan suasana perubahan yang baru

dari segi ekonomi mas terutama.”(Wawancara pada Hari Kamis, 26 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB, di Kantor BUM Desa).



Gambar 4.13 Wawancara Bersama Ketua Lembaga BUM Desa

Sumber: Dokumentasi Pribadi

2) Kerjasama antar Lembaga

Koordinasi antar Lembaga merupakan hal penting yang dapat mendukung dalam mencapai tujuan. Dalam upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, serta mengembangkan Desa Kerkep sebagai Desa Wisata/Pariwisata terdapat beberapa lembaga yang turut berperan. Adanya kerjasama dan koordinasi dari lembaga semakin memberikan dampak yang positif bagi BUM Desa.

Banyaknya manfaat tersebut dikarenakan pengetahuan, dan keterampilan yang berasal dari hasil promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUM Desa melalui brosur, baliho dan berbagai jenis Media massa dalam memperkenalkan Desa

Wisata/Pariwisata. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ria Natasari selaku Sekertaris BUM Desa.

“... Kalau kerja sama antar lembaga ada mas, dari pihak BUM Desa sendiri sementara ini sedang menjalin hubungan dengan lembaga Pendidikan lebih tepatnya ditingkat Sekolah Dasar (SD) sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan outbond. Kalau terkait dengan mekanisme sistemnya dari pihak BUM Desa sendiri hanya menyiapkan tempat parkir dan tempat untuk pelaksanaan outbondnya, kalau untuk perlengkapan keperluan seperti alat outbond biasanya langsung dari pihak sekolohnya pribadi mas. Kalau untuk biayanya biasanya diambil dari tiket masuk saja Rp.2000 per orang sedangkan untuk parkirnya tidak dipungut biaya.”*(Wawancara pada Hari Jum'at, 25 Juni 2021, pukul 09.00 WIB, di Kantor Desa Kerkep).*



Gambar 4.14 Wawancara Bersama Sekertaris Lembaga BUM Desa
Sumber: Dokumentasi Pribadi

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat ialah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi namun memberikan hambatan terhadap Pemerintah Desa khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Faktor penghambat yang akan peneliti bahas adalah faktor

penghambat yang berasal dari BUM Desa. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut, antara lain sebagai berikut:

1) Adanya sebagian masyarakat yang kurang mengerti terkait dengan tujuan berdirinya Lembaga BUM Desa

BUM Desa merupakan suatu institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat untuk membantu mengembangkan perekonomian Desa. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 mengamanatkan "Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa serta Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan potensi-potensi yang Desa miliki."

Terkait dengan tujuan berdirinya Lembaga BUM Desa, adanya sebagian masyarakat Desa Kerkep yang belum terlalu paham dan mengerti terkait apa dan maksud tujuan berdirinya Lembaga BUMDes. Hal ini seperti yang diungkap oleh Ibu Ina Prasetyawati selaku Bendahara BUM Desa.

"...Terkait hambatan tentu jelas ada mas ya, di sini hambatan yang dirasakan oleh rekan-rekan BUM Desa lebih menuju kearah masyarakat Desa mas, yang dimana kurangnya pengetahuan dan wawasan terkait dengan apa dan maksud tujuan lembaga BUM Desa ini didirikan, ya meskipun ada sebagian masyarakat yang kurang

mengerti tetapi harapan dari pihak BUM Desa sendiri seharusnya perlu menjadi perhatian khususnya dari pihak Pemerintah Desa untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat Desa terkait dengan apa dan maksud lembaga BUM Desa ini didirikan. Karena pada dasarnya lembaga ini didirikan nantinya untuk kepentingan masyarakat juga.”(Wawancara Pada Hari Jum’at, 27 agustus 2021, Pukul 10.00 WIB, di Kantor BUMDes Desa Kerkep).

4.5 Pembahasan dan Analisis Data

4.5.1 Peran BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

a. Peran BUM Desa Sebagai Fasilitator

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dianggap sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, sehingga BUM Desa dijadikan pilar demokrasi. BUM Desa diciptakan dengan tujuan untuk Meningkatkan perekonomian Desa, Mengoptimalkan asset Desa, Meningkatkan usaha masyarakat, Menciptakan peluang usaha, Menciptakan lapangan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya.

Sementara itu menurut Seyadi, (2015:16) BUM Desa memiliki peran sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUM Desa sebagai fondasinya.

d. Membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*Status*). Apabila seseorang ingin melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan status peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebab, saling bergantung satu sama lain. Pentingnya peranan ialah dapat mengatur perilaku-perilaku seseorang.

Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan sekitarnya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. peranan sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku (Soekanto, 2014:210-211).

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat merupakan salah satu tujuan dari Pemerintah Desa khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya kemampuan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki masyarakat Desa nantinya akan mampu menciptakan kemandirian bagi masyarakat dalam mengelola Desa. Desa yang mandiri akan mampu memberdayakan masyarakat melalui penguatan kapasitas seperti kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

Menurut Samadi dkk, (2015:7) terdapat salah satu butir yang menjelaskan Peran BUM Desa sebagai wadah untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat Desa. Sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan solusinya. BUM Desa Desa Kerkep, sebagai salah satu BUM Desa di Kabupaten Kediri, berusaha untuk menjadikan Desa Kerkep sebagai Desa yang mandiri dari segi ekonomi. Dengan cara merubah hal-hal kecil yang nantinya akan berdampak besar. Sebab, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada dasarnya merupakan Peran penting dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu memfasilitasi masyarakat, agar masyarakat dapat mampu meningkatkan kesejahteraan dari berbagai aspek.

Memberikan fasilitas untuk menciptakan pembaharuan merupakan tugas pemerintah sebagai pembuat kebijakan melalui

lembaga atau instansi yang akan berperan langsung dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. BUM Desa, Desa Kerkep berupaya untuk mengembangkan Desa menjadi kawasan TERPADU dengan melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa. Keberadaan potensi Desa tersebut ternyata tidak terelakan dari berbagai macam permasalahan, misalnya seperti kekurangan modal, dan kurangnya fasilitas. Maka dari itu diperlukan Peranan Pemerintah Desa khususnya BUM Desa yang dapat memecahkan persoalan tersebut.

1) Perencanaan atau strategi yang akan dibangun

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah usaha Desa, pembentukan BUM Desa adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat Desa baik itu Potensi Ekonomi, Sumber daya alam, ataupun Sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUM Desa adalah untuk menyerap tenaga kerja

Desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa melalui BUM Desa ini adalah untuk melayani masyarakat Desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa sesuai dengan Potensi Desa dan kebutuhan masyarakat.

Usaha yang dapat dijalankan oleh BUM Desa yaitu usaha dibidang Ekonomi atau Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pengelolaan sebuah bisnis harus dilakukan dengan baik agar BUM Desa sebagai lembaga bisnis masyarakat dapat berkembang, salah satunya adalah kegiatan menyusun rencana usaha (*Business Plan*), yakni penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam 1 periode sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUM Desa memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur.

Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris Lembaga BUM Desa.

Perencanaan bisnis merupakan langkah awal yang menunjukkan bahwa sebuah unit usaha serius untuk dijalankan, dan untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan, serta mengantisipasi setiap tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha.

Rencana usaha merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah organisasi usaha dimana sebuah organisasi bisnis yang tidak bisa membuat perencanaan sebenarnya merencanakan kegagalan. Rencana usaha harus dibuat tertulis sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk menjaga agar kegiatan bisnis terarah dan fokus pada pencapaian tujuan.

Dengan membuat suatu penilaian terlebih dahulu sebelum melakukan investasi yang kemudian dituangkan dalam suatu laporan secara tertulis, manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan bisnis adalah, bisa digunakan sebagai pedoman atau alat untuk mengetahui apakah kegiatan bisnis yang akan dijalankan itu memungkinkan dan memiliki kelayakan untuk dijalankan dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya serta dapat dijadikan sebagai alat pengawasan.

Fasilitas tidak diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi langsung, namun Pemerintah Desa serta BUM Desa harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus (*Continue*) kepada masyarakat yang sifatnya mendorong, memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasaranan dan sarana setiap jenis usaha.

Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, BUMDes Desa Kerkep secara keseluruhan harus memfasilitasi segala aktivitas perencanaan Badan Usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. BUM Desa telah mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada serta dukungan yang nantinya dapat menjadi masukan bagi para pelaku usaha di Desa. Dengan adanya masukan dan dukungan dari BUM Desa diharapkan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat, serta Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat.

2) Memfasilitasi Pembangunan Usaha Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Selain BUMDes Desa Kerkep telah mampu memberikan masukan, ternyata peran BUM Desa juga

memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam proses mengembangkan usaha.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat Desa, mengembangkan potensi Desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam Desa, mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya dan adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUM Desa.

Untuk BUM Desa Desa Kerkep bersama Pemerintah Desa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam saat ini sudah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa melalui potensi Desa yang dimiliki oleh Desa Kerkep.

3) Pemanfaatan Potensi Sumber daya alam

Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu Negara. Di sinilah banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia didalamnya. Sebelum Pemerintah menyadari hal tersebut Desa-desa tidak bisa berkembang dan tetap tertinggal. Namun ketika

Pemerintah menyadari akan Potensi Desa yang begitu besar mereka menerbitkan sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah maka banyak Daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama mengembangkan Desa mereka. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Badan Usaha Milik Desa yang sering disebut dengan BUM Desa adalah sebuah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan juga masyarakat Desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUM Desa merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan Masyarakat Desa.

BUM Desa diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan. Asset ekonomi yang ada di Desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. BUM Desa akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Ekonomi Masyarakat, Peran BUM Desa sebagai institusi

payung dalam menaungi kegiatan ekonomi masyarakat, Nurcholis (2011:8).

Untuk BUM Desa Desa Kerkep bersama Pemerintah Desa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam saat ini sudah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui potensi yang dimiliki oleh Desa Kerkep. Adanya tempat Wisata/Pariwisata yang akan dikembangkan oleh BUM Desa dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa. Melalui BUM Desa pengelolaan pariwisata yang akan dikembangkan nantinya dapat dikelola dengan baik dan membawa perubahan dibidang Ekonomi dan Sosial.

4.5.2 Upaya BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

a. Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan

Dalam organisasi maupun lembaga, diperlukan adanya suatu perbaikan dan peningkatan guna menjaga keberlangsungan sebuah organisasi. Untuk mencapai keadaan tersebut dibutuhkan perencanaan, penataan dan bimbingan dalam mewujudkan suatu perubahan nilai, fungsi, teknologi fisik, dan sosial. Selain itu, pembangunan kapasitas (*Capacity Building*) dapat berperan sebagai dedikasi penguatan ekonomi, pemerintah, lembaga serta individu melalui pendidikan, pelatihan, mentoring, dan pemasukan sumber. Menurut Daniel Rickett dalam Hardjanto, (2006:67) menyebutkan *“the ultimate goal of capacity*

building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mision". Lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan dari

pengembangan kapasitas adalah

1. Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme, dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah;
3. Mobilisasi sumber-sumber dana pemerintah, daerah dan lainnya;
4. Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kerkep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sudah menunjukkan adanya suatu perbaikan yang dilakukan dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, hal ini menyebabkan BUM Desa sudah dapat mengembangkan serta membangun potensi-potensi yang ada di Desa guna menciptakan suasana pertumbuhan ekonomi yang baru kepada masyarakat.

4.5.3 Faktor Pendukung dan Penghambat BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat tentunya terdapat faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi pendukung serta menjadi penghambat dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung ialah faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam Peran BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa. Faktor pendukung yang berasal dari Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai pihak yang ikut menyumbangkan aspirasi, inovasi, dan solusi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar menjadi lebih maju dan berkembang.

1) Dukungan Pemerintah Desa Kerkep

Untuk menciptakan kelompok masyarakat yang kuat dan mandiri diperlukan adanya koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak, tanpa adanya dukungan dari Pemerintah setempat, tentu pembangunan dan proses untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat tidak dapat berjalan dengan lancar. Sama halnya dengan dukungan yang diberikan Pemerintah Desa Kerkep kepada masyarakat khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah Desa yang berupaya untuk mengembangkan BUM Desa menjadi lebih baik dari sebelumnya, merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat.

Dukungan dari berbagai pihak sebagai fasilitator merupakan salah satu faktor pendukung dalam pencapaian suatu tujuan. Menurut Soleh, (2014:177) dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan tenaga-tenaga fasilitator yang handal, tidak hanya menyangkut persoalan yang bersifat fasilitatif semata, tetapi juga harus dapat memberikan motivasi, advokasi, atau pembedaan dan melindungi kepentingan mereka dari kepentingan pihak lain yang dapat merugikan mereka.

Dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat melalui BUM Desa, Pemerintah Desa Kerkep telah berupaya dengan baik, sebagai fasilitator Pemerintah setempat telah memberikan motivasi, dukungan, serta arahan bagi masyarakat khususnya bagi pengurus BUM Desa untuk terus mengelola dan mengembangkan BUM Desa. Selain itu, adanya dukungan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa setempat untuk mengembangkan Desa Kerkep sebagai kawasan tempat wisata yang bertujuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.

2) Kerjasama antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga atau instansi

merupakan hal penting yang dapat mendukung dalam mencapai tujuan. Koordinasi dan kerjasama dari berbagai pihak tentu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini yang dirasakan pengurus BUM Desa dari adanya kerjasama dari berbagai lembaga. Kerjasama dari pihak Kecamatan, Kabupaten dan instansi lainnya yang telah memberikan manfaat besar bagi BUM Desa.

Pemerintah yang memiliki Peran sebagai fasilitator memiliki fungsi untuk melakukan kerjasama.

Menurut Soleh, (2014:180) kerja sama dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan hubungan yang baik dengan penerima manfaat, tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun non formal. Dalam upaya

pencapaian tujuan, Pemerintah Desa dengan BUM Desa telah melakukan kerjasama dari berbagai pihak.

Kerjasama yang dibina telah mampu memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa serta BUM Desa.

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan BUM Desa dapat terus mengalami peningkatan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat ialah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi namun memberikan hambatan terhadap Pemerintah Desa khususnya BUM Desa dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Faktor penghambat yang akan peneliti bahas adalah faktor penghambat yang berasal dari BUM Desa. Adapun faktor-faktor penghambat yang dialami oleh BUM Desa ialah, sebagai berikut

1) Adanya sebagian masyarakat yang kurang mengerti terkait dengan tujuan berdirinya Lembaga BUMDes

Sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan, jumlah dan kualitas SDM yang mumpuni, diharapkan mampu menggerakkan kegiatan ini dengan sesuai dan baik. Namun hal tersebut tidak terjadi kepada masyarakat Desa Kerkep dimana kualitas masyarakatnya sebagian masih relatif rendah. Kualitas tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan yang masih rendah. Adanya sebagian dari masyarakat yang kurang mengerti terkait dengan apa dan maksud tujuan lembaga BUM Desa ini didirikan.

Maka dalam hal ini perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Desa untuk memberikan sosialisasi untuk masyarakat. Sosialisasi sangat perlu untuk dilakukan

guna memberikan gambaran mengenai BUM Desa dan berbagai kegiatan yang ada didalamnya. Sosialisasi dapat diberikan pada saat rapat RT/RW/Desa, rapat PKK, dan juga rapat anggota tahunan (RAT).

Sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya diberikan pada saat pendirian BUM Desa saja tetapi juga pada saat BUM Desa telah berjalan, hal tersebut perlu dilakukan dengan harapan dapat menarik perhatian dari masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

BUM Desa merupakan sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro Desa yang dikelola oleh masyarakat bersama dengan Pemerintah Desa. Pengelolaan BUM Desa terpisah dari kegiatan Pemerintah Desa diluar struktur organisasi Pemerintah Desa. Badan ini juga dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

Dalam menjalankan Perannya Sebagai Fasilitator, BUM Desa secara keseluruhan harus memfasilitasi segala aktivitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. Berdasarkan hasil Penelitian yang sudah dilakukan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Desa Kerkep, Kecamatan Guruh, Kabupaten Kediri sudah berusaha memberikan Peran yang terbaik dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

Terkait dengan Peran tersebut BUM Desa tidak hanya memberikan jasa pelayanan saja kepada masyarakat tetapi BUM Desa juga mampu memberikan fasilitas di beberapa bidang kegiatan usaha yang ada didalam masyarakat, seperti fasilitas outlet di tempat Desa Wisata/Pariwisata, dll.

Peran yang dilakukan BUM Desa sebagai fasilitator dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat sudah memberikan Kontribusi Peningkatan Ekonomi terutama kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat melalui pengembangan pengelolaan Desa Wisata/Pariwisata.

Terkait dengan penjelasan diatas bukan berarti BUM Desa tidak mempunyai hambatan dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, Faktor Penghambat ialah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi namun memberikan hambatan terhadap Pemerintah Desa khususnya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, hambatan yang terjadi kepada BUM Desa ialah adanya sebagian masyarakat yang kurang mengerti terkait dengan tujuan pendirian lembaga BUM Desa, hal ini tentu saja menghambat faktor kinerja BUM Desa kepada masyarakat karena lembaga ini didirikan pada dasarnya nantinya akan kembali lagi ke masyarakat, maka terkait hambatan tersebut harapan dari pihak BUM Desa lewat jalur pengembangan Potensi pengelolaan Desa Wisata/Pariwisata bisa membuat masyarakat mengerti mengapa lembaga BUM Desa ini didirikan.

Namun dibalik adanya faktor penghambat ada juga faktor-faktor pendukung yang diberikan oleh BUM Desa, faktor pendukung ialah faktor yang menjadi dukungan kepada BUM Desa dalam melaksanakan pengelolaan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa, tanpa terkecuali dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada BUM Desa

dalam mengoptimalkan kinerja pengelolaan Desa Wisata/Pariwisata dan dukungan Kerjasama antar Lembaga.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan Peneliti selama melaksanakan Penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah seharusnya Peran yang dilakukan BUM Desa sebagai fasilitator kepada masyarakat tidak tertuju/terfokus disatu bidang kegiatan saja melainkan ada beberapa bidang yang seharusnya dikelola oleh BUM Desa yang berkolaborasi bersama masyarakat misalnya seperti pemberdayaan masyarakat dibidang UMKM, dibidang Pertanian dan lain-lain.

Karena pada dasarnya dengan banyaknya usaha yang dikelola oleh BUM Desa akan memberikan Output (*Hasil*) yang lebih besar juga terutama kepada masyarakat Desa. Maka dalam hal ini Pemerintah Desa harus mempersiapkan Planning Perencanaan kedepan yang sesuai dan tepat sasaran khususnya untuk BUM Desa agar mempunyai berbagai bidang usaha yang nantinya akan dikelola oleh BUM Desa yang berkolaborasi bersama masyarakat.

Terkait dengan adanya masyarakat yang kurang mengerti mengapa lembaga BUM Desa ini didirikan seharusnya perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Desa untuk memberikan sosialisasi untuk masyarakat. Sosialisasi sangat perlu untuk dilakukan guna memberikan gambaran mengenai BUM Desa dan berbagai kegiatan yang ada didalamnya. Sosialisasi dapat diberikan

pada saat rapat RT/RW/Desa, rapat PKK, dan juga rapat anggota tahunan (RAT). Sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya diberikan pada saat pendirian BUM Desa saja tetapi juga pada saat BUM Desa telah berjalan, hal tersebut perlu dilakukan dengan harapan dapat menarik perhatian dari masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.



DAFTAR PUSTAKA

Miles & Huberman, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. United States Of America: SAGE Publications, Inc.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif (EdisiRevisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nurcholis & Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Seyadi. 2015. *BUM Desa Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015:16.

Salusu J. 2003. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Non Profit*. Jakarta: PT. Grandmedia Grasindo.

Siagan, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pasolong, Harnabi. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung Afabeta.

Lorosa. 2017:26. *Pengaruh Pelaksanaan Program Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. (Studi di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung), Jurusan Ekonomi Fakultas dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Muryani. 2018:15-16. *Pembangunan BUM Desa dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Tjiptoherijanto & Manurung. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*. Bandung Fokus Media.

Surjarwerni, V; Wiranta. 2019:1. *Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif; Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Michel M. Harmon & Richard T. Mayer. 2014. *Teori Organisasi Untuk Administrasi Publik*. Kreasi Wacana Bantul.

Alison, Mahmudi. 2010:37. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UUP STI, YKPN, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 2009:212. *Teori Peranan*. Jakarta, Bumi Aksara.

A. Dunsire & Afriyanto. 2014:1. *Administrasi Publik*.

Karto Hadi Koesoemo, Ayu dan Syawie. 2015:17. *Desa*. Balai Pustaka, Jakarta.

Rogers, Ayu & Syawie. 2015:177-178. *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*. Surabaya: Usaha Nasional.

Samadi, Arrafiqur Rahman, Afrizal. 2015:7. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*. (Studi Pada BUM Desa Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu) Diambil Dari : <https://ejournal.upp.ac.id/index.php/fekon/article/view> diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

Matlof Salusu. 2013:7. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Edisi 7 Jakarta: Grasindo.

Yunus. 2016:18. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Henne, Aime dan Desmidt. 2010:76. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. dialihbahaskan oleh Faisal Afif. Bandung: PT Refika Aditama.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2015 Tentang Desa

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang, Pemerintah Daerah.

Afriyanto, Hadi. 2014. *Teori Administrasi Publik*.

<https://andriraf.files.wordpress.com/2014/11/03-tugasteori-ap.pdf> diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

Hadi & Sholichul. 2016. *Manajemen Strategis*. <http://shadibakri.uniba.acid/wp-content/uploads/2016/09/makalah-manajemen-strategis-subtutik-handayani.pdf> diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

Komara, Eko Kurniawan dan Nurul Purnamasari. 2016. *Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. <https://www.keuangandes.com/wp-content/uploads/2016/05/MANFAAT-BUM-DESA->

[BAGIMASYARAKATrevised.pdf](#) diakses pada tanggal 28 Juli 2021.

Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kediri. www.kedirikab.go.id diakses pada tanggal 2 Agustus 2021.

Jumlah Desa di Indonesia. <https://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 12 Agustus 2021.

Indeks Desa Membangun. <https://idm.kemendes.go.id> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.



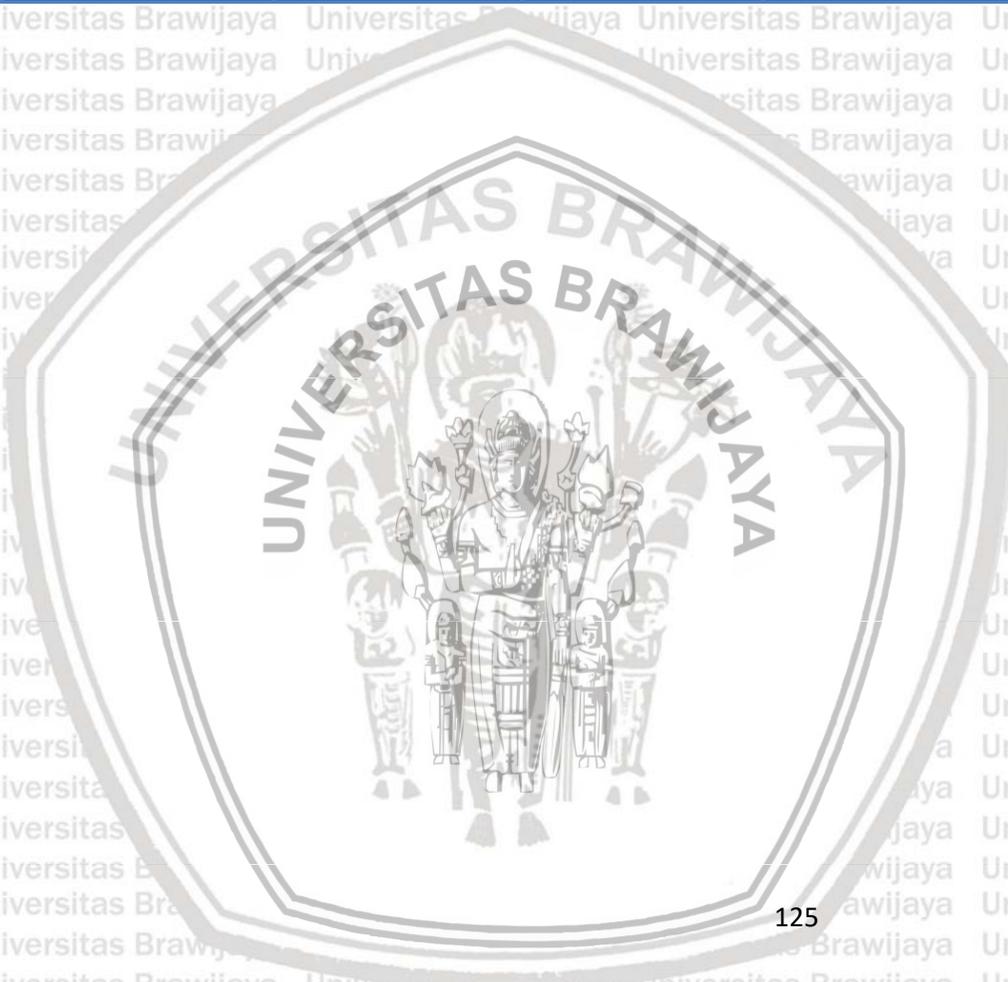
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 5.1 Instrumen Penelitian Pedoman Wawancara/Interview Guide Penelitian

| No. | Rumusan | Fokus Penelitian | | Poin-poin penting | Sumber Data | |
|-----|--|---|-----------------------------------|--|---|--|
| | Masalah | Fokus | Sub Fokus | Item-item Pertanyaan | Primer | Sekunder |
| 1. | Bagaimanakah peran BUMDes dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. | Peran BUMDes dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. | Peran BUM Desa kepada masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana terkait dengan perencanaan atau strategi yang akan dibangun oleh Pemerintah Desa, dalam rangkan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes? dan bagaimana peran BUMDes dalam melaksanakan kegiatan operasional tersebut? 2. Apakah ada fasilitas yang diberikan oleh BUM Desa kepada masyarakat untuk pembangunan usaha dalam meningkatkan ekonomi? 3. Bagaimanakah peran BUM | <p>Kantor Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.</p> <p>Di rumah ibu R selaku salah satu pemilik usaha.</p> <p>Kantor BUM Desa, Desa Kerkep, Kecamatan</p> | <p>Data, Dokumentasi dan Informasi Wawancara maupun Observasi Lapangan.</p> <p>Data, Dokumentasi dan Informasi Wawancara maupun Observasi Lapangan.</p> <p>Data, Dokumentasi dan Informasi</p> |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|--|
| | | | | <p>Desa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Desa ?</p> <p>4. Bagaimana upaya BUM Desa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat?</p> | <p>Gurah,Kabupaten Kediri. Kantor BUM Desa, Desa Kerkep, Kecamatan Gurah,Kabupaten Kediri.</p> | <p>Wawancara maupun Observasi Lapangan.</p> <p>Data,Dokumentasi dan Informasi Wawancara maupun Observasi Lapangan.</p> |
| 2. | <p>Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung BUMDes dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat.</p> | <p>Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.</p> | <p>Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.</p> | <p>1. Bagaimana terkait dengan faktor-faktor pendukung, khususnya pada Pemerintah Desa Kerkep kepada BUMDes?</p> <p>2. Bagaimana terkait dengan sistem Kerjasama antar Lembaga yang dilakukan oleh BUMDes? Dan kerjasama peran lembaga apa saja yang sering berkontribusi kepada BUMDes?</p> <p>3. Apa saja faktor-faktor penghambat yang</p> | <p>Kantor BUM Desa, Desa Kerkep, Kecamatan Gurah,Kabupaten Kediri.</p> <p>Kantor BUM Desa, Desa Kerkep, Kecamatan Gurah,Kabupaten Kediri.</p> <p>Kantor BUM Desa, Desa</p> | <p>Observasi, Data dan Informasi Wawancara.</p> <p>Observasi, Data dan Informasi Wawancara.</p> <p>Observasi, Data dan Informasi</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | dimiliki oleh BUMDes dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat? | Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. | Wawancara. |
|--|--|--|--|--|--|------------|



Lampiran 5.2 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Faisal Wisnunggala

Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 05 Mei 1998

Alamat Tempat Tinggal : Jl.Pemuda No.45, RT/002,RW/003, Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia, 64181

Nomor Tlp/Handphone : Tlp/WA 085706039485

E-mail : wisnunggalafaisalwisnu@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 1. SD Negeri Kerkep : 2005-2011
- 2. SMP Negeri 1 Gurah : 2011-2014
- 3. SMA Negeri 1 Gurah : 2014-2017

Pengalaman Organisasi : 1. Anggota Master Fight Organization Of Sport Universitas Brawijaya Tahun 2018

Lampiran 5.3 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Malang : Jalan Veteran Malang, 65145, Indonesia
Telp.: +62341-551611, 575777; Fax : +62341-565420
Kediri : Jalan Raya Mrican, Kota Kediri 64111, Indonesia
Telp.: +62354-770733, 770766; Fax : +62354-770763
http://www.ub.ac.id E-mail: ubkampus3@ub.ac.id

No. : 1300/UN10.A40/PP/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian Riset / Survey Skripsi

Yth.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kediri
Jl. Soekarno Hatta No. 01
Kab. Kediri – Jawa Timur

Berkenaan dengan kegiatan Akademik Skripsi, pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Semester Genap TA. 2020/2021, pada mahasiswa :

nama : Faisal Wisnunggala
NIM : 175030118113026
program studi : Ilmu Administrasi Publik
fakultas : Ilmu Administrasi
judul : Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes.

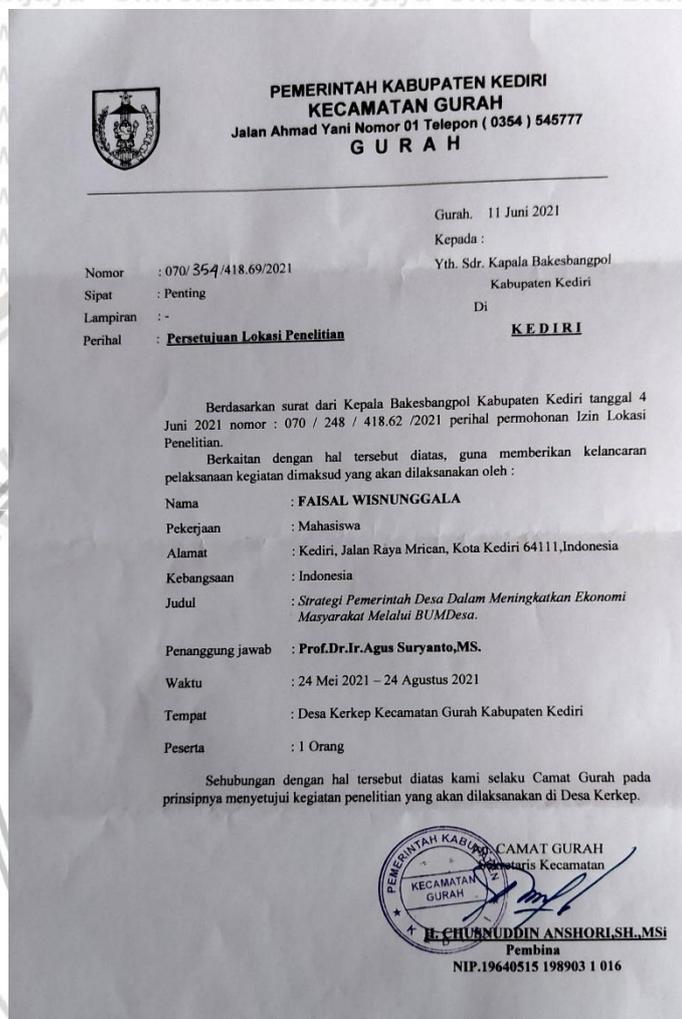
Mohon dapat diijinkan untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Riset Skripsi di BUMDes Desa Kerkep, mulai tanggal 24 Mei 2021 s/d 24 Agustus 2021.

Atas kerjasama dan bantuan untuk kegiatan tersebut, diucapkan terimakasih.

Kediri, 24 Mei 2021
a.n. Direktur
Wakil Direktur
Bidang Akademik dan Kerjasama
PSIKU UB Kediri

Prof. Dr. Ir. Agus Suryanto, MS.
NIP.1955081819810311008

Lampiran 5.1 Surat Izin Lokasi Penelitian Dari Kecamatan Gurah



Lampiran 2.5 Surat Izin Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kediri



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969
 K E D I R I
 Website : www.kedirikab.go.id Email: bakesbangpol@kedirikab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070 / 278 / 418.62 / 2021

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Menimbang : 1. Surat Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerjasama, PSDKU Universitas Brawijaya Kediri tanggal 24 Mei 2021 Nomor : 1300/UN10.A40/PP/2021 Perihal Permohonan Penelitian Riset/Survey Skripsi.
 2. Surat Persetujuan Lokasi dari Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tanggal 11 Juni 2021 Nomor : 070/354/418.69/2021 Perihal Persetujuan Lokasi Penelitian.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Faisal Wisnanggala
- b. Alamat : Kediri, Jalan Raya Mrican, Kota Kediri 64111, Indonesia
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Organisasi : PSDKU Universitas Brawijaya
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :

- f. Judul Proposal : *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes.*
- g. Tujuan : Penyelesaian Kuliah
- h. Bidang Survey : Ilmu Administrasi Publik
- i. Penanggung Jawab : Prof. Dr.Ir. Agus Suryanto, MS.
- j. Anggota/Peserta : 1 Orang
- k. Waktu : 24 Mei 2021 - 24 Agustus 2021
- l. Lokasi : Desa Kerkep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

Dengan ketentuan : 1. Pemohon diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian dimasa Pandemi Covid-19 saat ini secara daring/online dan Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19.
 2. Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan.
 3. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat.
 4. Data hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/survey hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas akademik pemohon/peneliti dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan pemerintah daerah/instansi lokasi kegiatan.
 5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan pemohon/peneliti agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatannya minimal 1 exemplar kepada Bakesbangpol Kabupaten Kediri.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



TEMBUSAN : Kepada Yth.

- 1. Bapak Bupati Kediri (sebagai laporan);
- 2. Sdr. Ka. Balitbangda Kab. Kediri;
- 3. Sdr. Camat Gurah;
- 4. Sdr. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerjasama, PSDKU Universitas Brawijaya;
- 5. ARSIP.

Lampiran 5.6 Penyerahan Berkas Penelitian di Bagian Administrasi Desa

Kerkep



Lampiran 5.3 Dokumentasi Penelitian



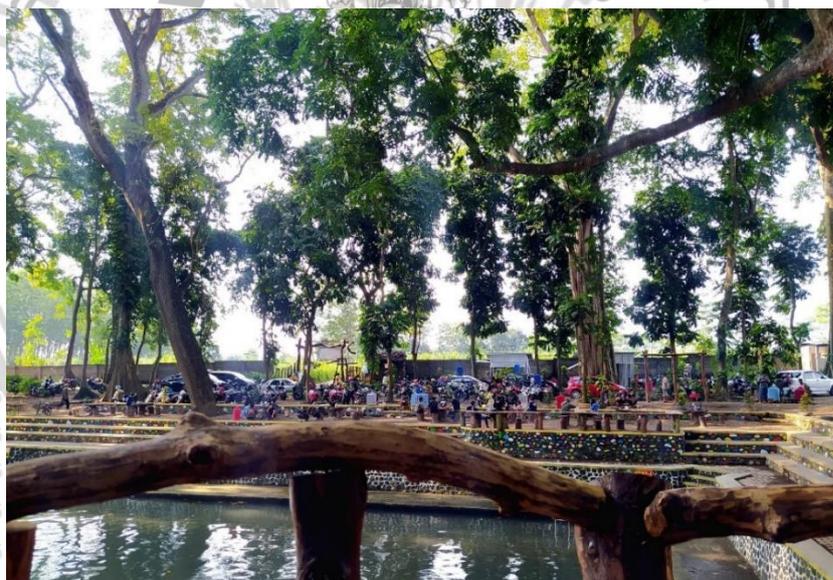
Gambar 4.15 Foto Bersama Kepala Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri



Gambar 4.16 Kantor Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri



Gambar 4.17 Kantor BUMDes Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri



Gambar 4.18 Kunjungan di Desa Wisata/Pariwisata Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri

Lampiran 5.4 Hasil Wawancara

Item-item Pertanyaan :

1. Bagaimana terkait dengan perencanaan atau strategi yang akan dibangun oleh Pemerintah Desa, dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes? dan bagaimana peran BUMDes dalam melaksanakan kegiatan operasional tersebut ?
2. Apakah ada fasilitas yang diberikan oleh BUM Desa kepada masyarakat untuk pembangunan usaha dalam meningkatkan ekonomi ?
3. Bagaiman peran BUM Desa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Desa ?
4. Bagaimana upaya BUM Desa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat ?
5. Bagaimana terkait dengan faktor-faktor pendukung, khususnya pada Pemerintah Desa Kerkep kepada BUMDes ?
6. Bagaimana terkait dengan sistem Kerjasama antar Lembaga yang dilakukan oleh BUMDes? Dan kerjasama peran lembaga apa saja yang sering berkontribusi kepada BUMDes ?
7. Apa saja faktor-faktor penghambat yang dimiliki oleh BUMDes dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat ?

Jawaban :

1. Bapak Bondhan Wijokangko Selaku Komisaris BUM Desa

Terkait dengan strategi perencanaan yang akan dibangun, sementara ini program yang dijalankan oleh BUM Desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui unit usaha Desa Wisata/Pariwisata BUMDes mas, program ini sudah berjalan tetapi masih dalam tahap proses pembangunan. Tujuan dari program tersebut ialah tentu saja yang *pertama* sebagai wadah penyaluran kreatifitas masyarakat yang akan dijual ditempat wisata yang *kedua* menciptakan suasana pertumbuhan ekonomi yang baru yang *ketiga* untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes).” (Wawancara pada hari Senin, 14 Juni 2021, pukul 10.30 WIB, di Kantor Desa Kerkep).

2. Ibu R Selaku Salah Satu Pemilik Usaha

Kalau fasilitas ada mas, saya ambil contoh seperti outlet tempat jualan saya di tempat wisata itu dulu di siapkan oleh BUM Desa, kalau terkait dengan sistemnya sebelumnya dari pihak BUM Desa sendiri sudah menyiapkan 7 outlet di tempat wisata, tetapi outlet ini berbayar mas tidak gratis terkait dengan harga outlet tersebut kisaran Rp.1.500.000 per outletnya, kalau sistem pembayaran bisa diangsur selama jangka waktu 1 tahun, namanya juga tempat wisata mas ya kadang sepi kadang ramai hasil pendapatan tidak selalu pasti atau konsisten.”(Wawancara pada Hari Jum'at, 27 Agustus 2021, pukul 08.30 WIB, di Desa Kerkep).

a) Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Ina Prasyawati selaku Bendahara BUM Desa.

Kalau terkait fasilitas, dari pihak BUM Desa sendiri sebagai fasilitator sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat mas, seperti fasilitas-fasilitas outlet ditempat wisata itu merupakan rasa kepedulian dari pihak BUM Desa untuk lebih mementingkan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi. Sebenarnya terkait fasilitas bukan hanya outlet ditempat wisata ya mas, dulu juga pernah waktu pelatihan budidaya jamur tiram yang dikelola oleh karang taruna dari pihak BUM Desa sendiri juga memfasilitasi berupa lokasi/tempat untuk melaksanakan praktik budidaya jamur tiram, tetapi budidaya jamur tiram tersebut sudah tidak berjalan mas karena adanya kendala dari anggota karang taruna yang semakin lama semakin berkurang dan pemasaran produk hasil panen yang terlalu sulit.” (Wawancara pada Hari Jum’at, 27 agustus 2021, Pukul 10.00 WIB, di Kantor BUMDes Desa Kerkep).

3. Bapak Bondhan Wijokangko selaku Komisaris BUM Desa

Sementara ini kegiatan BUM Desa masih saya fokuskan untuk mengelola Desa Pariwisata mas, sambil menunggu proses penambahan wahana tempat wisata, BUM Desa juga sudah mempunyai penghasilan sendiri mas dari tempat wisata sebesar Rp.1.000.000 perbulannya. Penghasilan tersebut sementara ini masih mengambil dari tiket masuk

Rp.2000 per orang dan parkir sebesar Rp.3000 jadi total Rp.5000 untuk masuk ditempat wisata, kan sementara ini ada juga beberapa masyarakat yang sudah berjualan ditempat wisata, penghasilan yang mereka dapatkan perbulannya sebesar Rp.500.000 - 800.000 itupun tidak pasti namanya juga tempat wisata mas ya kadang sepi kadang ramai cuman berdasarkan laporan yang saya terima bisa saya katakan rata-rata sementara penghasilan mereka segitu mas, sambil terbukanya tempat wisata tidak lupa protokol kesehatan tetap dijalankan mas ditempat wisata".
(Wawancara pada Hari Jum'at, 25 Juni 2021, pukul 09.00 WIB, di Kantor Desa Kerkep).

4. Bapak Tomi Selaku Pengelolaan BUM Desa.

Kalau terkait dengan penguat kapasitas kelembagaan, dulu awal mula BUM Desa ini didirikan pada tahun 2017 peran BUM Desa kepada masyarakat belum maksimal mas karena dari pihak Pemerintah Desa sendiri semata-mata mendirikan BUM Desa hanya untuk menutupi kekurangan kelembagaan yang ada di Desa dan dari pihak Pemerintah Desa sendiri masih terfokus untuk menjalankan program pembangunan yang ada di Desa. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan adanya potensi yang akan dikelola akhirnya dari pihak Pemerintah Desa sendiri melibatkan BUM Desa untuk mengelola potensi tersebut, disini peran BUM Desa kepada masyarakat pelan-pelan mulai kelihatan mas, seperti melibatkan masyarakat dalam kegiatan operasional BUM Desa, memonitoring, memfasilitasi usaha masyarakat, dll. Ya meskipun ada

sebagian masyarakat yang belum mengerti terkait dengan tujuannya berdirinya lembaga BUM Desa mas ya, tetapi harapan dari rekan-rekan BUM Desa sendiri lewat jalur pengembangan potensi yang ada di Desa dengan melibatkan masyarakat mampu memberikan pengetahuan dan wawasan terkait dengan apa dan maksud lembaga BUM Desa ini didirikan”.

(Wawancara pada Hari Jum'at, 27 agustus 2021, Pukul 09.00 WIB, di Kantor BUMDes Desa Kerkep).

5. Bapak Andhik selaku Ketua BUM Desa.

Sebelumnya memang dari pihak Pemerintah Desa dan BUMDes memiliki komunikasi yang kurang mas, tapi dengan adanya kemauan dan niat untuk berusaha mengembangkan potensi Desa melalui BUMDes, keduanya mulai menjalin kerjasama antar pengurus/pengelola BUMDes dan Pemerintahan Desa. Demi terciptanya potensi yang dimiliki oleh Desa yang dimana bisa memberikan suasana perubahan yang baru dari segi ekonomi mas terutama.” *(Wawancara pada Hari Kamis, 26 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB, di Kantor BUM Desa).*

6. Ibu Ria Natasari selaku Sekertaris BUM Desa.

Kalau kerja sama antar lembaga ada mas, dari pihak BUM Desa sendiri sementara ini sedang menjalin hubungan dengan lembaga Pendidikan lebih tepatnya ditingkat Sekolah Dasar (SD) sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan outbond. Kalau terkait dengan mekanisme sistemnya dari pihak BUM Desa sendiri hanya menyiapkan tempat parkir dan tempat untuk pelaksanaan outbondnya, kalau untuk perlengkapan

keperluan seperti alat outbond biasanya langsung dari pihak sekolohnya pribadi mas. Kalau untuk biayanya biasanya diambil dari tiket masuk saja Rp.2000 per orang sedangkan untuk parkirnya tidak dipungut biaya.

”(Wawancara pada Hari Jum’at, 25 Juni 2021, pukul 09.00 WIB, di Kantor Desa Kerkep).

7. Ibu Ina Prasetyawati selaku Bendahara BUM Desa.

Terkait hambatan tentu jelas ada mas ya, di sini hambatan yang dirasakan oleh rekan-rekan BUM Desa lebih menuju kearah masyarakat Desa mas, yang dimana kurangnya pengetahuan dan wawasan terkait dengan apa dan maksud tujuan lembaga BUM Desa ini didirikan, ya meskipun ada sebagian masyarakat yang kurang mengerti tetapi harapan dari pihak BUM Desa sendiri seharusnya perlu menjadi perhatian khususnya dari pihak Pemerintah Desa untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat Desa terkait dengan apa dan maksud lembaga BUM Desa ini didirikan. Karena pada dasarnya lembaga ini didirikan nantinya untuk kepentingan masyarakat juga.”*(Wawancara Pada Hari Jum’at, 27 agustus 2021, Pukul 10.00 WIB, di Kantor BUMDes Desa Kerkep).*